Kementerian PPN/ Bappenas | Pusbindiklatren

LAPORAN KINERJA (LKJ) PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

2023

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas memainkan peran penting dalam membangun kapasitas perencanaan nasional di Indonesia. Melalui berbagai program dan inisiatif, Pusbindiklatren berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan publik.

Pertama, Pusbindiklatren menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi para perencana di berbagai tingkat pemerintahan. Ini mencakup pelatihan teknis tentang berbagai aspek perencanaan, seperti analisis data, pemantauan, dan evaluasi program, baik di bidang teknis perencanaan maupun spesifik pada sektor-sektor tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para perencana memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan rencana yang efektif dan efisien.

Kedua, Pusbindiklatren juga berfokus pada pembinaan perencana, serta mendukung pengembangan kapasitas institusional bidang perencanaan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas perencana, Pusbindiklatren memperhatikan kebutuhan organisasi (*institutional needs*) yang telah disusun dalam *Human Capital Development Plan* (HCDP).

Ketiga, Pusbindiklatren berupaya untuk mempromosikan budaya perencanaan yang kuat di Indonesia. Ini melibatkan advokasi untuk pentingnya perencanaan dalam pembangunan nasional, serta penyebaran praktik terbaik dan pelajaran yang dipelajari. Dalam hal ini, Pusbindiklatren ikut serta dalam menjembatani penguatan sinkronisasi perencanaan di pusat dan daerah melalui program pendidikan dan pelatihan yang diselengarakan.

Laporan Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk transparansi kinerja dan akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi baik secara internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas. Hasil-hasil pembelajaran dan kinerja yang dicapai pada tahun 2023 merupakan suatu bentuk upaya kontribusi Pusbindiklatren dalam mendorong upaya penyusunan perencanaan yang berkualitas dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Harapannya, laporan kinerja ini dapat menjadi refleksi dan pembelajaran bagi Pusbindiklatren untuk terus melakukan perbaikan, baik di bidang pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan jabatan fungsional perencana di pusat dan daerah.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

Wignyo Adiyoso

NIP 196905072001121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Indikator Kinerja

1. Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi

Dalam indikator kinerja persentase Jabatan Fungsional Perencana yang Lulus Uji Kompetensi pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pusbindiklatren 2023, target yang ingin dicapai adalah sebesar 73%. Berdasarkan realisasi tahun 2022, Pusbindiklatren telah melampaui target tersebut dengan pencapaian kelulusan sebesar 90,95%. Persentase kelulusan uji kompetensi tersebut dicapai dari kelulusan peserta uji kompetensi untuk kenaikan jenjang dan pelatihan fungsional perencana ahli pertama. Terdapat 432 peserta yang lulus dari total 475 peserta yang mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana. Namun, secara keseluruhan Pusbindiklatren telah melakukan uji kompetensi untuk 2.193 orang dengan total sebanyak 1.520 orang lulus uji kompetensi, jumlah ini mencakup peserta uji kompetensi untuk perpindahan jabatan.

2. Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan

Dalam indikator kinerja Persentase Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan pada PK Kepala Pusbindiklatren 2023, target yang ingin dicapai adalah sebanyak 80%. Berdasarkan realisasi tahun 2023, Pusbindiklatren telah berhasil melampaui target tersebut dengan persentase karyasiswa yang lulus mencapai 81,93%. Upaya yang dilakukan oleh Pusbindiklatren dalam mendukung kelulusan karyasiswa dengan mengadakan pemantauan karyasiswa dan melakukan komunikasi secara aktif dengan program studi mengenai perkembangan karyasiswa.

3. Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan

Dalam indikator kinerja Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pusbindiklatren 2023, target yang ingin dicapai adalah sebanyak 94%. Pusbindiklatren berhasil meluluskan 1.234 orang peserta pelatihan atau 99,92% dari total peserta pelatihan. Jumlah tersebut didapatkan dari pelatihan teknis perencanaan, pelatihan spesifik, *on the job training,* dan pelatihan mandiri.

4. Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan

Dalam Indikator Kinerja Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh

Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan, target yang telah ditetapkan untuk indikator kerja ini yaitu 90—94.9%. Berdasarkan realisasi pada tahun 2023, Pusbindiklatren masih belum dapat mencapai target tersebut. Capaian realisasi Pusbindiklatren untuk indikator kinerja ini adalah 100% dengan total sebanyak 11 inovasi kebijakan telah dihasilkan dan diimplementasikan.

5. Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam indikator kinerja Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, target yang telah ditetapkan untuk indikator kerja ini yaitu 85 Berdasarkan data realisasi pada tahun 2022, Pusbindiklatren telah melampaui target tersebut dengan capaian sebesar 96,10. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusbindiklatren terhadap layanan pembinaan JFP serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

6. Persentase Tata Kelola Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana yang Sesuai dengan Ketentuan dan Aturan yang Berlaku

Dalam indikator kinerja Persentase Tata Kelola Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana yang Sesuai dengan Ketentuan dan Aturan yang Berlaku, target yang telah ditetapkan untuk indikator kerja ini, yaitu 100 persen. Berdasarkan data realisasi di tahun 2023, Pusbindiklatren telah mencapai target tersebut dengan capaian sebesar 100 persen. Nilai ini diperoleh berdasarkan pelaksanaan tata kelola Pusbindiklatren Bappenas yang mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas (ZI), Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), Proses Bisnis, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

7. Persentase Pengelolaan Realisasi Anggaran Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana

Dalam indikator kinerja Persentase Pengelolaan Realisasi Anggaran Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, target yang telah ditetapkan untuk indikator kerja ini, yaitu 92%. Berdasarkan data realisasi di tahun 2023, Pusbindiklatren telah melampaui target tersebut dengan capaian sebesar 99,38%. Nilai ini diperoleh berdasarkan realisasi penyerapan sebesar Rp81.776.813.323,00 dari total anggaran Rp82.286.430.000,00.

8. Tingkat Kepuasan atas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam indikator kinerja Indeks Kepuasan atas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, target yang telah ditetapkan untuk indikator kerja ini yaitu sebesar 92. Pada tahun 2023, Pusbindiklatren telah dapat melampaui target tersebut dengan realisasi mencapai 96,12. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusbindiklatren terhadap pembinaan JFP serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

9. Persentase Pemenuhan Direktif Pimpinan Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi

Dalam indikator Persentase Pemenuhan DIrektif Pimpinan Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi, target yang telah ditetapkan untuk indikator kerja ini yaitu sebesar 92%. Pada tahun 2023, Pusbindiklatren telah dapat melampaui target tersebut dengan realisasi mencapai 100%. Nilai ini diperoleh berdasarkan pelaksanaan kegiatan dari penugasan lain yang diberikan pimpinan baik Menteri maupun Eselon I yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusbindiklatren.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pusbindiklatren mengelola anggaran sebesar Rp82.286.430.000,00 yang terdiri atas (1) Rupiah Murni (RM) Pusbindiklatren sebesar Rp51.514.505.000,00 dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp30.771.925.000,00 (*loan* PHRD IV Rp30.721.925.000,00 dan SMART Rp50.000.000,00). Realisasi total RM adalah Rp51.449.582.239,00 (99,87%) dan realisasi total PLN adalah Rp30.327.231.084,00 (98,55%). Secara keseluruhan, total realisasi anggaran Pusbindiklatren pada tahun 2023 sebesar Rp81.776.813.323,00 atau 99,38% dari total anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____ **iii**

IKHTISAR EKSEKUTIF ____ **iv**

A. Capaian Indikator Kinerja ____ iv

B. Capaian Kinerja Anggaran ____ vi

DAFTAR ISI ____ **vii**

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ____ **ix**

A. Daftar Tabel ____ ix

B. Daftar Gambar ____ x

BAB I. PENDAHULUAN ____ **1**

A. Latar Belakang ____ 1

B. Tujuan ____ 1

C. Dasar Hukum ____ 2

D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ____ 2

E. Sumber Daya Manusia (SDM) ____ 6

F. Potensi dan Isu Strategis ____ 10

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ____ **15**

A. Rencana Strategis 2020–2024 ____ 15

B. Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2023 ____ 15

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023 ____ 18

D. Alokasi Anggaran Tahun 2023 ____ 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ____ **22**

A. Capaian Peran Pusbindiklatren dalam Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD ____ 22

B. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2023 ____ 24

C. Capaian Kinerja Lainnya ____ 44

D. Capaian Kinerja Anggaran Pusbindiklatren Tahun 2023 ____ 53

E. Evaluasi Internal 56

BAB IV. PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

B. Tindak Lanjut 57

LAMPIRAN 61

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Pusbindiklatren Tahun 2023 - Perjanjian Kinerja Tahun 2023 62

Lampiran 2. Jumlah Total Karyasiswa yang Lulus Pendidikan Tahun 2023 65

Lampiran 3. Pelatihan Fungsional Perencana Tahun 2023 66

Lampiran 4. Pelatihan Teknis dan Spesifik Tahun 2023 67

Lampiran 5. Pelatihan Mandiri 68

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Pusbindiklatren ____ 7

Tabel 1.2 Rincian Jumlah Pejabat Fungsional Pusbindiklatren ____ 7

Tabel 1.3 Data Jumlah Kebutuhan Jabatan di Pusbindiklatren ____ 8

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2023 ____ 15

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Pusbindiklatren ____ 19

Tabel 3.1 Kegiatan Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD ____ 23

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Pusbindiklatren 2023 ____ 24

Tabel 3.3 Jumlah Peserta Uji Kompetensi Tahun 2023 ____ 27

Tabel 3.4 Jumlah Kelulusan Peserta Uji Kompetensi JFP Tahun 2023 ____ 27

Tabel 3.5 Jumlah Kelulusan Uji Kompetensi JFP bagi Perencana Tahun 2023 ____ 28

Tabel 3.6 Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan Tahun 2023 ____ 29

Tabel 3.7 Jumlah Target dan Realisasi Karyasiswa yang Dijadwalkan Lulus Pendidikan Tahun 2022 ____ 29

Tabel 3.8 Realisasi Peserta Pelatihan yang Lulus Pelatihan Tahun 2023 ____ 31

Tabel 3.9 Persentase Inovasi Kebijakan yang Diimplementasikan oleh Pusbindiklatren Institusi/ Unit Kerja Sasaran Tahun 2023 ____ 32

Tabel 3.10 Tingkat Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan dalam Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ____ 34

Tabel 3.11 Pelaksanaan Tata Kelola di Lingkup Pusbindiklatren ____ 35

Tabel 3.12 Persentase Pengelolaan Anggaran Lingkup Pusbindiklatren 2023 ____ 36

Tabel 3.13 Tingkat Kepuasan atas Layanan dalam Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ____ 36

Tabel 3.14 Pemenuhan Direktif Pimpinan di Lingkup Pusbindiklatren ____ 38

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Perencana yang Lulus Uji Kompetensi Tahun 2023 dan 2022 ____ 40

Tabel 3.16 Perbandingan Jumlah Kelulusan Karyasiswa Tahun 2023 dan 2022 ____ 41

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Peserta Terlatih Tahun 2023 dan 2022 41

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Inovasi Kebijakan Pusbindiklatren Tahun 2023 dan 2022 42

Tabel 3.19 Perbandingan Tingkat Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan Pusbindiklatren Tahun 2023 dan 2022 43

Tabel 3.20 Perbandingan Persentase Pengelolaan Realisasi Anggaran Pusbindiklatren Tahun 2023 dan 2022 43

Tabel 3.21 Perbandingan Tingkat Kepuasan Layanan Pusbindiklatren Tahun 2023 dan 2022 44

Tabel 3.22 Tindak Lanjut Rekomendasi 2022 44

Tabel 3.23 Inovasi Pusbindiklatren Tahun 2023 49

Tabel 3.24 Daftar Instansi yang Mengikuti Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Perencana 51

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran 2023 53

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Per Penanggung Jawab 54

Tabel 3.27 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2023 dan 2022 55

Tabel 3.28 Kriteria Efisiensi Anggaran 55

B. Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas 6

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bertanggung jawab dalam menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas terlibat langsung di dalam tanggung jawab tersebut. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa Pusbindiklatren mengemban tugas fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Peranan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas ini dipertegas di Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020—2024.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan organisasi pemerintah, Pusbindiklatren diwajibkan menyampaikan capaian kinerja organisasi tahunan yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKj). Dokumen LKj ini disusun berdasarkan hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama pada perjanjian kinerja Kepala Pusbindiklatren. Penyusunan dokumen LKj dilaksanakan tidak hanya berdasar asas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, namun juga berorientasi pada perbaikan kinerja kelembagaan melalui inovasi-inovasi program maupun praktik baik yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren sepanjang tahun 2023.

B. Tujuan

Penyusunan LKj ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta penganggaran kegiatan yang berbasis kinerja dalam upaya mendukung Reformasi Birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, penyusunan LKj ini dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan dan perbaikan kegiatan Pusbindiklatren pada tahun 2023.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKj adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kementerian PPN/Bappenas, Peraturan Menterei PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020—2024. Di samping itu, dalam penyusunan LKj ini mengacu pada Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.142/M.PPN/HK/11/2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas.

D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pusbindiklatren telah diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 213 dan Pasal 214. Sebagaimana tercantum dalam pasal 213, Pusbindiklatren memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusbindiklatren menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan dan pelatihan perencanaan;
b. penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
c. perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan;
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan;
e. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah;
f. fasilitasi dan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas;
d. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;
e. pelaksanaan akreditasi program pelatihan di bidang perencanaan pembangunan dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana; dan
f. pelaksanaan administrasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pusbindiklatren pada tahun 2023 telah mengalami perubahan dengan menghilangkan struktur tim dan menggantinya menjadi struktur penanggung jawab kegiatan (PJK). Masing-masing kegiatan diturunkan dari indikator kinerja utama Kapusbindiklatren. Pada tahun 2023, Pusbindiklatren terdiri atas lima kelompok kerja (Pokja) yang dikoordinir oleh Ketua Pokja. Di dalam setiap Pokja, terdapat beberapa Penanggung Jawab Kegiatan (PJK). Berikut tugas dan rincian kegiatan pada masing-masing Pokja.

a. Pokja Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan (Pokja 0)

Pokja 0 mempunyai tugas dalam merencanakan dan mengembangkan sistem dan layanan informasi pendidikan dan pelatihan perencanaan, melakukan penyusunan tata kelola kegiatan, melaksanakan urusan persuratan, pengelolaan keuangan, dokumentasi dan pelayanan kehumasan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 0 terbagi atas sembilan kegiatan yaitu:

1) Pengelolaan anggaran;
2) Pengelolaan BMN dan barang persediaan;
3) Pengelolaan pengadaan;
4) TU, kearsipan, dan administrasi pusat;
5) Pengembangan SDM Internal Pusbindiklatren;
6) Kegiatan khusus;
7) Pengelolaan Pelayanan;
8) Sistem informasi dan *database*;
9) Publikasi dan diseminasi informasi;
10) Penyusunan laporan SPIP;
11) Penyusunan laporan penilaian kinerja pegawai Pusbindiklatren.

b. Pokja Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan (Pokja 1)

Pokja 1 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengembangan kebijakan teknis, program, kurikulum, dan standar pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Pokja 1 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 1 terbagi atas 11 kegiatan yaitu

1) Evaluasi program pendidikan dan pelatihan;
2) Evaluasi kebutuhan jumlah ASN Perencana;
3) Evaluasi kebijakan dan standar pelatihan;

4) Kebijakan dan pengembangan program pendidikan;
5) Kebijakan dan pengembangan program pelatihan;
6) Pengembangan kerja sama program peningkatan kapasitas SDM;
7) Telaah kebijakan dan penugasan khusus;
8) Penyusunan rencana anggaran dan program pendidikan dan pelatihan;
9) Pengelolaan kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
10) Penyusunan pedoman pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
11) Fasilitasi *Human Capital Development Plan* (HCDP).

c. Pokja Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan (Pokja 2)

Pokja 2 mempunyai tugas dalam melaksanakan persiapan, seleksi, penempatan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, Pokja 2 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 2 terbagi atas 7 kegiatan yaitu

1) Seleksi pendidikan;
2) Penempatan pendidikan;
3) Pelaksanaan pendidikan;
4) Persiapan, seleksi, dan penempatan pelatihan;
5) Diseminasi informasi dan *outreach*;
6) Pemantauan dan pengendalian program pendidikan;
7) Pemantauan dan pengendalian program pelatihan.

d. Pokja Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (Pokja 3)

Pokja 3 mempunyai tugas dalam melaksanakan persiapan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) pada instansi pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, Pokja 3 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindiklatren. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pokja 3 terbagi atas 13 kegiatan, yaitu

1) Penyusunan regulasi JFP;
2) Pedoman penyusunan formasi JFP;
3) Pengangkatan, kenaikan pengkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali ke dalam JFP;

4) Penyusunan Juknis Standar Kompetensi JFP;
5) Penyusunan Juknis Pengembangan Kompetensi JFP;
6) Evaluasi materi uji kompetensi JFP;
7) Uji kompetensi JFP;
8) Pemantauan dan pengendalian JFP;
9) Penilaian JFP;
10) Seminar nasional JFP;
11) Sosialisasi/*workshop* JFP;
12) Kerja sama dengan PPPI;
13) *Policy paper* (karya tulis ilmiah).

e. Kelompok Strategis

Kelompok Strategis mempunyai tugas memberikan analisis atas saran, masukan, dan rekomendasi dari kelompok ahli dan membantu pelaksanaan program dan kegiatan Pusbindiklatren. Kelompok ini terdiri atas kelompok fungsional dan staf perencana. Kegiatan pada kelompok strategis terbagi menjadi enam kegiatan, yaitu

1) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
2) Penugasan khusus strategis pimpinan;
3) Fasilitasi Widyaiswara;
4) Evaluasi *roadmap* Pusbindiklatren;
5) Pengembangan *corporate university*;
6) *Training need analysis* Perencana.

Struktur organisasi Pusbindiklatren secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

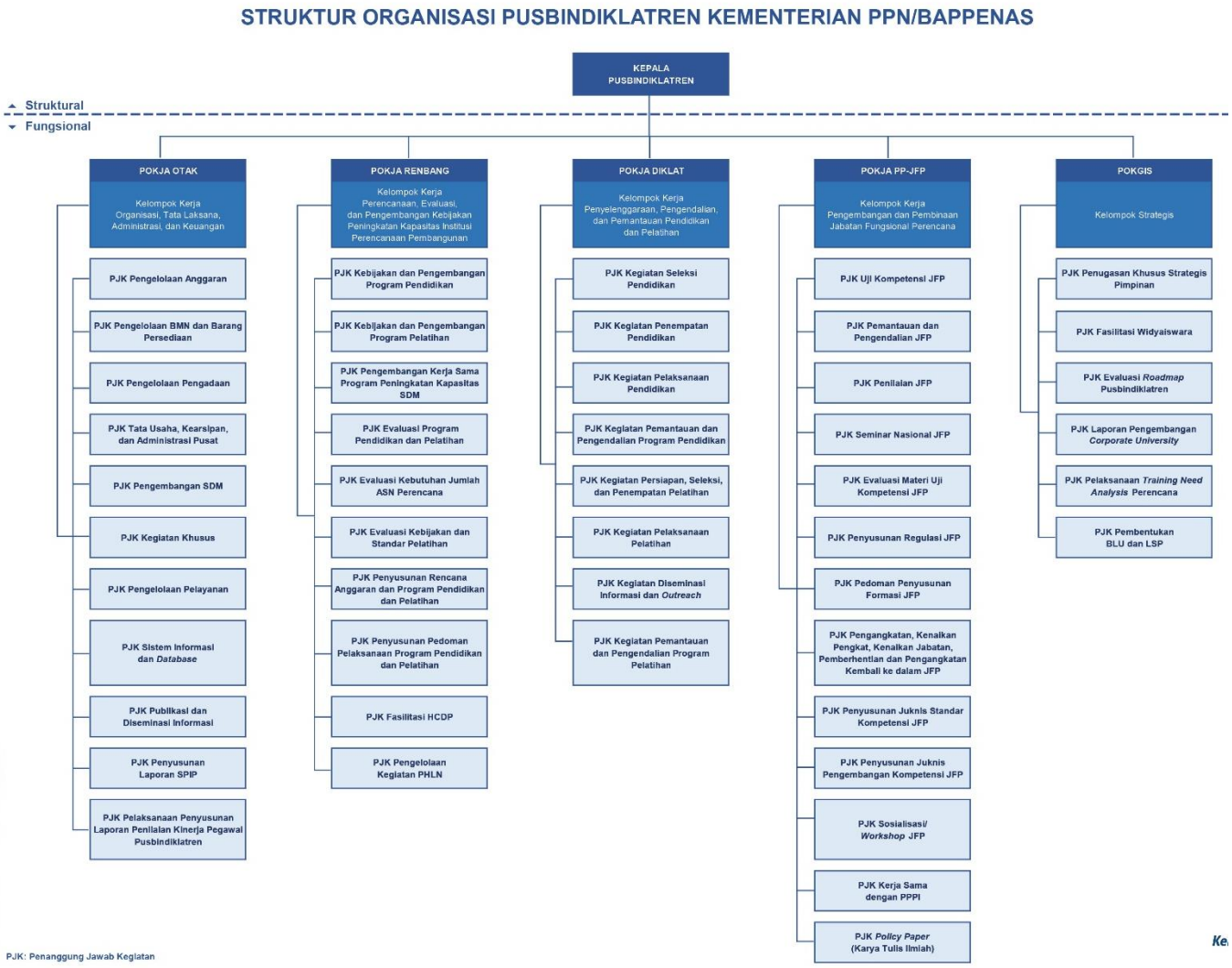

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

E. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM di Pusbindiklatren pada tahun 2023 yaitu sebanyak 90 orang dengan rincian 26 orang (28,89%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 64 orang (71,11%) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Pada tahun 2023, terdapat 3 orang PNS Pusbindiklatren yang purna tugas. Di samping itu, terdapat 1 orang PNS yang mendapatkan promosi ke instansi lain dan 1 orang PNS mendapatkan penugasan ke unit kerja lain di Kementerian PPN/Bappenas. Jumlah PPNPN pada tahun 2023 mengalami penambahan jumlah orang dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan jurnal Kementerian PPN/Bappenas dan perekrutan tenaga ahli untuk mendukung sistem informasi. Komposisi SDM Pusbindiklatren berdasarkan status pegawai dan jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Pusbindiklatren

No	Usia (tahun)	PNS (orang)		PPNPN (orang)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	< 30	2	4	8	6
2	31—40	2	2	20	8
3	41—50	0	1	15	1
4	> 50	9	6	6	0
Total		**13**	**13**	**49**	**15**

Berdasarkan kelompok jabatan, PNS Pusbindiklatren terdiri atas satu orang Pejabat Struktural, 21 orang Pejabat Fungsional dan 4 orang pelaksana. Jika dilihat berdasarkan jenis jabatan fungsionalnya, sebanyak 12 orang berada pada Jabatan Fungsional Perencana, 4 orang pada Fungsional Analis Kebijakan, 3 orang pada Fungsional Widyaiswara, dan 2 orang pada Fungsional Arsiparis.Rincian jumlah pegawai jabatan fungsional beserta jenjang pegawai Pusbindiklatren dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Rincian Jumlah Pejabat Fungsional Pusbindiklatren

No	Fungsional	Jumlah					
		Mahir	Pertama	Muda	Madya	Utama	Total
1	Widyaiswara	-	-	-	1	2	3
2	Perencana	-	7	2	3	-	12
3	Analis Kebijakan	-	-	2	2	-	4
4	Arsiparis	1	-	-	1	-	2
TOTAL							**21**

Perbandingan jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan analisis beban kerja dan ketersediaan SDM eksisting di Pusbindiklatren dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Data Jumlah Kebutuhan Jabatan di Pusbindiklatren

No	Fungsional	Perhitungan Jumlah ABK	Jumlah Pegawai Eksisting		Sisa (+/-)
			PNS	PPNPN	
1	Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana	1	1	-	0
2	Widyaiswara Utama	2	2	-	0
3	Widyaiswara Madya	2	1	-	-1
4	Widyaiswara Muda	3	-	-	-3
5	Widyaiswara Pertama	4	-	-	-4
6	Perencana Madya	5	3	-	-2
7	Perencana Muda	5	2	-	-2
8	Perencana Pertama	7	7	-	0
9	Staf Perencana	-	1	-	+1
10	Analis Kebijakan Madya	3	2	-	-1
11	Analis Kebijakan Muda	4	2	-	-2
12	Analis Kebijakan Pertama	1	-	-	-1
13	Arsiparis Madya	-	1	-	+1
14	Arsiparis Mahir	-	1	-	+1
15	Arsiparis Terampil	1	-	-	-1
16	Pranata Komputer Muda	1	-	-	-1
17	Pranata Komputer Pertama	7	-	3	-4
18	Pustakawan Pertama	2	-	-	-2
19	Pranata Keuangan APBN Terampil	15	-	-	-15

No	Fungsional	Perhitungan Jumlah ABK	Jumlah Pegawai Eksisting		Sisa (+/-)
			PNS	PPNPN	
20	Sekretaris	4	-	1	-3
21	Analis Kinerja	4	-	-	-4
22	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	10	-	14	+4
23	Perancang Grafis	2	-	2	0
24	Pengadministrasi Umum/Tata Usaha	1	2	3	+4
25	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	-	-	3	+3
26	Pengelola Anggaran	-		3	+3
27	Pengelola Data Pencairan Dana	-	-	2	+2
28	Pengadministrasi Keuangan	-	-	2	+2
29	Pengadministrasi BMN	-	-	1	+1
30	Pengadministrasi Persuratan	-	-	2	+2
31	Pranata Kearsipan	-	-	3	+3
32	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	-	1	+1
33	Pranata Pengadaan Barang/Jasa	-	-	2	+2
34	Pengelola Layanan Kehumasan	-	-	2	+2
35	Pengelola JPP	-	-	6	+6
36	Pramubakti	-	1	5	+6
37	Sekuriti*	-	-	5	+5
38	Pengemudi**	-	-	3	+3
39	**Jumlah**	**84**	**26**	**64**	**+6**

* *berasal dari Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas*

** *berasal dari Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas*

Kebutuhan pegawai Pusbindiklatren 2023 sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.7/SES/HK/01/2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kementerian PPN/Bappenas adalah 84 orang. Tabel 1.2 di atas membandingkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan kondisieksisting pegawai Pusbindiklatren saat ini. Beberapa jabatan eksisting yang terdapat di Pusbindiklatren belum termasuk dalam penetapan analisis jabatan untuk tahun 2023, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja menyesuaikan dengan kebutuhan Pusbindikltren. Secara keseluruhan, selisih antara kebutuhan dan kondisi eksisting adalah 6 orang.

F. Potensi dan Isu Strategis

Sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang bergerak di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan ASN perencana, Pusbindiklatren memiliki sejumlah potensi dan permasalahan strategis yang menjadi tantangan Pusbindiklatren meliputi beberapa hal berikut.

1. Potensi/Peran Strategis

a. Peran Pusbindiklatren sebagai Enabler Pembangunan

Dalam rangka memastikan bahwa target perencanaan pembangunan dapat dicapai, maka perlu didukung sumber daya manusia pembangunan sesuai dengan bidang priroitas pembangunan yang ditetapkan dalam jangka pendek dan menengah. SDM pembangunan ini terdiri dari ASN Perencana, ASN non-perencana yang langsung maupun tidak langsung melaksanakan program prioritas pembangunan. Peran enabler pembangunan dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional, khususnya melalui pengembangan kapasitas ASN Perencana Pembangunan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren).

b. Meningkatnya Jumlah Fungsional Perencana

Pasca penyederhanaan birokrasi melalui terbitnya Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Pusbindiklatren mencatat sekitar 7.010 pejabat fungsional perencana (per Desember 2023) baik di instansi pemerintah pusat ataupun di daerah. Terdapat peningkatan jumlah pejabat fungsional perencana sekitar 19% dibandingkan tahun 2022. Pusbindiklatren sebagai instansi Pembina perencana nasional memiliki tugas untuk memastikan seluruh pejabat fungsional memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi jabatannya di tiap jenjang. Oleh karena itu, peran Pusbindiklatren dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas masih diperlukan.

c. Mitra Pembangunan di Dalam maupun di Luar Negeri

Pusbindiklatren Bappenas, sejak tahun 1984 (melalui Overseas Training Office/OTO), berperan dalam peningkatan kompetensi ASN melalui beasiswa pendidikan gelar master dan doktor di luar negeri, dalam negeri dan linkage. Selain *Professional Human Resource Development* (PHRD) yang saat ini memasuki tahap IV, program beasiswa lain yang dikelola Pusbindiklatren adalah *Scholarship Program for Strengthening Reforming Institution* (SPIRIT) dan *Coral Reef Rohabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative* (COREMAP·CTI). Proyek PHRD IV didukung pinjaman Pemerintah Jepang, sedangkan SPIRIT dan COREMAP-CTI mendapat pendanaan berupa pinjaman dari Bank Dunia. Selain itu, terdapat juga berbagai program beasiswa Hibah luar negeri seperti New Zealand Aid (NZAid) dan Australian Awards Indonesia (AAI).

d. Mitra Universitas yang Tersebar di Seluruh Indonesia dan di Luar Negeri

Berbekal pengalaman mengelola kegiatan hibah dan pinjaman luar negeri, Pusbindiklatren telah berhasil menjalin jejaring dengan berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Hingga saat ini, Pusbindiklatren telah memiliki kerja sama dengan lebih dari 20 program studi pada 12 perguruan tinggi negeri dan beberapa program studi pada perguruan tinggi di luar negeri. Hal ini memberikan peluang bagi Pusbindiklatren untuk merancang dan melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan dengan mitra terbaik sesuai dengan kepakaran yang dimiliki.

Pada tahun 2023 diinisiasi kerja sama dengan dua universitas luar negeri, yaitu Nanyang Technology Unviersity dan Lee Kuan Yew School of Public Policy, National Unviersity of Singapore untuk pelaksanaan program hibah pendidikan luar negeri. Selain itu, dengan Monash University di Indonesia juga dilakukan kerja sama hibah biaya pendidikan di dalam negeri.

e. Mitra Kerja Sama Program Pendidikan dan Pelatihan *Cost Sharing*

Dengan adanya restrukturisasi postur anggaran Pusbindiklatren, sejak tahun 2022, Pusbindiklatren telah menginisiasi penjajakan kerja sama dengan institusi mitra *cost sharing* pelaksanaan program pendidikan maupun pelatihan. Mitra institusi kerja sama *cost sharing* ini ditujukan untuk tingkat Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Diharapkan keterlibatan dan rasa pemilikan instansi mitra bisa bertambah melalui kerja sama *cost sharing* ini, sehingga dapat bersama-sama dengan Pusbindikaltren memantau dan mengevaluasi program yang dilaksanakan.

Selama tahun 2023, Pusbindiklatren telah menandatangani empat naskah kerja sama cost sharing dengan mitra pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Batu, dan Pemerintah Kabupaten

Penajam Passer Utara. Pada saat yang sama juga sedang dijajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun institusi mitra *cost sharing* pelatihan di antaranya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kota Palembang, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

f. Alumni Program Pendidikan dan Pelatihan

Hingga 2023, alumni Pusbindiklatren tercatat mencapai 10.244 orang untuk program pendidikan dan 21.871 orang alumni program pelatihan. Jejaring alumni yang cukup besar dan tersebar di tingkat instansi pusat dan instansi daerah ini menunjukkan peran Pusbindiklatren sebagai pendukung penyelerasan program dan perencanaan pembangunan. Selain itu, hal ini juga dapat dimanfaatkan Pusbindiklatren untuk mengoptimalkan potensi dalam menjalin kerja sama program Pendidikan dan pelatihan, di antaranya adalah kerja sama *cost sharing*.

2. Permasalahan Strategis

a. Kerangka Regulasi

Regulasi JFP dalam rentang waktu tiga tahun terakhir ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kebijakan pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana tersebut meliputi (i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana; (ii) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Perencanaan Pembangunan; (iii) PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; (iv) PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil; (v) PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan (vi) Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional. Oleh karena itu, selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren menyusun petunjuk teknis, panduan operasional, dan melaksanakan edukasi serta advokasi kepada pemangku kepentingan atas implikasi dari perubahan-perubahan tersebut dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Perencana.

Di samping itu, program dan kegiatan pengembangan kompetensi dan peningkatan SDM PNS yang dijalankan Pusbindiklatren berdasarkan perhitungan kebutuhan yang masih berupa proyeksi. Idealnya seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mengacu pada Rencana Pengembangan Kompetensi SDM, khususnya aparatur

perencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut belum secara merata disusun oleh instansi Kementerian/Lembaga/Daerah. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis yang diambil Pusbindiklatren di antaranya adalah bekerja sama dengan LAN melakukan fasilitasi dan konsultasi pendampingan penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi, mengoptimalkan *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang sudah ada, serta mensyaratkan dokumen HCDP bagi seluruh pelamar program Pendidikan dan pelatihan.

Selain dua isu strategis regulasi di atas, Pusbindiklatren juga dihadapkan pada ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyikapi hal ini, Pusbindiklatren tetap menjalankan arahan yang bersifat direktif pimpinan tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon II terkait.

b. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di ranah pendidikan dan pelatihan ASN bidang perencanaan serta pengembangan dan pembinaan JFP, Pusbindiklatren selama ini memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN). Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan dari pemanfaatan sumber dana tersebut.

Selain pendanaan APBN/PHLN yang terbatas, kebijakan Kementerian Keuangan yang tidak lagi memperbolehkan pinjaman luar negeri sebagai sumber pendanaan program pendidikan juga menjadi tantangan yang harus diatasi oleh Pusbindiklatren untuk keberlanjutan program/kegiatan yang diselenggarakan. Untuk itu, Pusbindiklatren kini perlu menjajaki dan mengeksplorasi peluang sumber pendanaan alternatif baru melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Penjajakan peluang ini dilaksanakan sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan pembinaan JFP.

c. Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusbindiklatren

Beberapa isu teknis yang dihadapi oleh Pusbindiklatren dalam menjalankan tugas dan fungsinya dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada tahun 2023, Pusbindiklatren menyelenggarakan uji coba program pelatihan teknis dan spesifik secara bauran atau perpaduan antara sesi dalam jaringan (daring) dan sesi luar jaringan (luring). Secara umum, pelaksanaan pelatihan tersebut berjalan dengan baik, tetapi harus diperhatikan masih terdapatnya kendala jaringan yang dihadapi pada wilayah tertentu, khususnya afirmasi. Oleh sebab itu, pada tahun mendatang, Pusbindiklatren akan memberikan diskresi bagi pelatihan afirmasi untuk dilakukan secara luring.

2) Kesinambungan antara desain program dengan pelaksanaannya di lapangan harus dijaga dengan baik. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan suatu kegiatan akan melibatkan perancang dan pelaksananya yang mana terbagi ke dalam kelompok kerja yang berbeda. Oleh karenanya, keterlibatan dan kerja sama antarkelompok kerja mulai dari merancang, mengeksekusi, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi suatu program diperlukan agar didapatkan sinergi dan keberlanjutan untuk penyempurnaan dan perbaikan rancangan kegiatan di masa mendatang.
3) Pusbindiklatren kini tengah mengupayakan adanya peralihan metode pelatihan dari klasikal menjadi non-klasikal. Penyusunan rencana desain pelatihan non-klasikal sudah dimulai pada tahun 2021. Rencana tersebut disusun oleh Pusbindiklatren dalam rangka mengidentifikasi alternatif arah pengembangan organisasi Pusbindiklatren ke depan yang lebih *agile* dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, Pusbindiklatren perlu melakukan reviu kompatabilitas konsep *Corporate University* (Corpu), Badan Layanan Umum (BLU), dan institut.
4) Pusbindiklatren perlu memperluas cakupan promosi program pendidikan (*outreach*) demi meningkatkan partisipasi pendaftar dari instansi daerah. Hal ini didasarkan dari temuan bahwa terdapat sejumlah daerah yang belum mendaftarkan pegawainya menjadi karyasiswa Pusbindiklatren. Sebagai contoh, Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PDTT) Tahun 2023 menargetkan Pusbindiklatren untuk menerima 15 orang karyasiswa dari Kabupaten Nias Barat untuk mengikuti program S-2 Afirmasi Dalam Negeri. Akan tetapi, hingga tahun 2023, Pusbindiklatren belum menerima pendaftar program S-2 Afirmasi Dalam Negeri dari Kabupaten Nias Barat.
5) Idealnya, program-program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Perencana maupun PNS lain yang bekerja di bidang perencanaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, Pusbindiklatren juga menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS dengan tugas dan fungsi di luar perencanaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi Pusbindiklatren berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tugas dan fungsi yang secara riil dilaksanakan oleh Pusbindiklatren.

BAB II.
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020–2024

Perencanaan Kinerja Pusbindiklatren disusun berdasarkan target kinerja dan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024. Indikator kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas yang mendukung indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas adalah (1) terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; (2) terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner; dan (3) terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Pusbindiklatren mendukung capaian *output* Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Target kinerja dan indikator kinerja utama Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas diturunkan ke dalam sasaran kegiatan/output Pusbindiklatren.

B. Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2023

Kepala Pusbindiklatren telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) dengan target Indikator Kinerja seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun 2023	
		Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	**Indikator SS 1.1:** Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi		
	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi	75%
		Persentase karyasiswa yang Lulus Pendidikan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Tahun 2023	
		Indikator Kinerja	**Target Tahun 2023**
		Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	94%
2	**Indikator SS 3.2:** Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan		
	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan	Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan	90%—94.9%
3	**Indikator SS 4.1:** Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas		
	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	85
	Manajemen Internal	Persentase pelaksanaan tata kelola lingkup Pusbiindiklatren yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku	100%
		Persentase pengelolaan realisasi anggaran lingkup Pusbindiklatren	92%
4	**Indikator SS 4.2:** Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan		
	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	92
	Manajemen Internal	Persentase pemenuhan direktif pimpinan lingkup Pusbindiklatren yang sesuai dengan tugas dan fungsi	92%

Pada tahun 2023, PK Kapusbindiklatren terdiri atas 4 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja utama (IKU). Kamus indikator kinerja Pusbindiklatren dalam PK Pusbindiklatren Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Perencana yang Lulus Uji Kompetensi adalah Fungsional Perencana yang lulus uji kompetensi untuk naik jenjang jabatan dan peserta pelatihan fungsional perencana ahli pertama yang lulus uji kompetensi pada akhir pelatihan.. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah perencana yang lulus uji kompetensi dibandingkan dengan jumlah perencana yang mengikuti uji kompetensi.

b. Karyasiswa yang lulus program pendidikan adalah karyasiswa yang berhasil lulus program pendidikan pada tahun yang dijadwalkan atau ditargetkan. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah realisasi karyasiswa yang dijadwalkan lulus pendidikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target karyasiswa yang dijadwalkan lulus pendidikan pada tahun berjalan.

c. Peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan adalah peserta pelatihan nonfungsional yang mengikuti dan lulus dalam program pelatihan yang dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan K/L/D. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah peserta pelatihan nonfungsional yang lulus program pelatihan dibandingkan dengan jumlah total peserta pelatihan nonfungsional.

d. Inovasi Kebijakan/Program Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana adalah kebijakan/program inovatif yang dihasilkan Pusbindiklatren untuk selanjutnya diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah inovasi kebijakan/program pembinaan JFP dan Pengembangan diklat yang diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran dibandingkan dengan jumlah inovasi kebijakan/program pembinaan JFP dan pengembangan diklat yang dihasilkan.

e. Penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mencakup (1) ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik; (2) ketersediaan SOP dan pedoman yang dapat diakses oleh publik; (3) pengelolaan keluhan yang dapat diakses oleh publik; (4) penyusunan laporan yang dapat diakses oleh publik. Formula yang digunakan adalah capaian hasil survei penilaian *stakeholder* terhadap penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

f. Pelaksanaan tata kelola (*governance*) lingkup Pusbindiklatren merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Pusbindiklatren untuk mendukung capaian organisasi. Kegiatan tata kelola diantara lain seperti: Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas (ZI), dan Proses Bisnis. Formula yang digunakan

adalah persentase jumlah hasil pelaksanaan tata kelola Pusbindiklatren sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rencana pelaksanaan tata kelola lingkup Pusbindiklatren sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

g. Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan. Realisasi anggaran adalah jumlah uang yang berhasil dibelanjakan sesuai SP2D. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah realisasi anggaran lingkup Pusbindiklatren pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah pagu anggaran lingkup Pusbindiklatren pada tahun berjalan.

h. Tingkat Kepuasan layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kepuasan pengguna layanan layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pelayanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan meliputi layanan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. *Stakeholder* Pusbindiklatren yang menjadi responden survei kepuasan meliputi seluruh penerima layanan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas. Formula yang digunakan adalah capaian hasil survei penilaian kepuasan *stakeholder* terhadap layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

i. Pemenuhan direktif pimpinan lingkup Pusbindiklatren merpakan penugasan lain yang diberikan pimpinan, baik Menteri maupun Eselon I yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja. Formula yang digunakan adalah persentase jumlah penugasan lain yang diberikan pimpinan dan selesai dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dibandingkan dengan jumlah penugasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) disusun pada awal tahun berdasarkan IKU Kapusbindiklatren yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Kapusbindiklatren tahun 2023. Kegiatan yang diselenggarakan Pusbindiklatren selama 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan Pusbindiklatren

Indikator Kinerja Sesmen PPN/Sestama Bappenas	Rencana Hasil Kerja Kapusbindiklatren	No.	Kegiatan	Waktu Pelaporan
Pelaksanaan Pemenuhan Target Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi	Pencapaian target Perencana yang Lulus Uji Kompetensi	1	Uji Kompetensi JFP	April, Juni, Agustus, Oktober, Desember
	Pencapaian target Karyasiswa yang lulus pendidikan	2	Kebijakan dan Pengembangan Program Pendidikan	September
		3	Kegiatan Seleksi Pendidikan	April, Juli
		4	Kegiatan Penempatan Pendidikan	Februari, Juli
		5	Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan	Februari, Juli, Desember
		6	Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Program Pendidikan	Maret, Juni, Oktober
	Pencapaian target Peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	7	Kebijakan dan Pengembangan Program Pelatihan	Mei
		8	Evaluasi Kebijakan dan Standar Pelatihan	Juni
		9	Kegiatan Persiapan, Seleksi, dan Penempatan Pelatihan	Maret, April
		10	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan	November
		11	Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Program Pelatihan	Mei, Desember
Penyusunan Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan	Penyusunan Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan	12	Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan	Desember
		13	Pengembangan Kerja Sama Program Peningkatan Kapasitas SDM	Juni, Desember
		14	Evaluasi Kebutuhan Jumlah ASN Perencana	November
		15	Fasilitasi HCDP	Desember
		16	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan	Desember
		17	Penyusunan Juknis Pengangkatan, Kenaikan Pengkat, Kenaikan Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam JFP	Juni
		18	Penyusunan Juknis Standar Kompetensi JFP	Juni, Oktober
		19	Penyusunan Juknis Pengembangan Kompetensi JFP	November
		20	Pedoman Penyusunan Formasi JFP	April
		21	Pengembangan Kebijakan JFP	Desember
		22	*Training Need Analysis* Perencana	

Indikator Kinerja Sesmen PPN/Sestama Bappenas	Rencana Hasil Kerja Kapusbindiklatren	No.	Kegiatan	Waktu Pelaporan
Pelaksanaan Pencapaian Target Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	23	Sistem Informasi dan *Database*	Desember
		24	Publikasi dan Diseminasi Informasi	Desember
		25	Evaluasi Materi Uji Kompetensi JFP	Desember
		26	Pemantauan dan Pengendalian JFP	November
		27	Penilaian JFP	Desember
	Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku	28	TU, Kearsipan, dan Administrasi Pusat	Desember
		29	Pengembangan SDM Internal Pusbindiklatren	Maret, Juli, November
		30	Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan	Juni, Desember
		31	Pengelolaan Pengadaan	Juni, Desember
		32	Kegiatan Khusus	Desember
		33	Pengembangan *Corporate University*	Desember
		34	Evaluasi *Roadmap* Pusbindiklatren	Desember
		35	Penyusunan Laporan SPIP	Desember
		36	Penilaian Kinerja Pegawai Pusbindiklatren	Desember
	Pengelolaan realisasi anggaran lingkup Layanan Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana	37	Pengelolaan Anggaran	Maret, Juni, September, Desember
		38	Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Pendidikan dan Pelatihan	Maret, Juli
		39	Pengelolaan Kegiatan PHLN	Desember
Pelaksanaan Layanan yang dapat Mencapai Target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan	Pelaksanaan Layanan yang dapat mencapai target tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	40	Seminar Nasional JFP	Oktober
		41	Sosialisasi/*Workshop* JFP	April, Agustus, Desember
		42	Kerja Sama dengan PPPI	Desember
		43	*Policy Paper* (Karya Tulis Ilmiah)	Juli, September
		44	Kegiatan Diseminasi Informasi dan *Outreach*	Juli, Desember
		45	Pengelolaan Pelayanan	Desember
	Pelaksanaan Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Layanan Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi	46	Pembentukan BLU dan LSP	Desember
		47	Penugasan Khusus dan Strategis Pimpinan	Desember
		48	Fasilitasi Widyaiswara	Desember

Pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan di Pusbindiklatren dikoordinir oleh Penanggungjawab Kegiatan (PJK). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 diturunkan dari masing-masing IKU Kapusbindiklatren. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan di Pusbindiklatren akan mendukung ketercapaian IKU Kapusbindiklatren dan juga berkontribusi pada pencapaian IKU Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Dalam perencanaan kegiatan tahunan Pusbindiklatren, masing-masing penanggung jawab kegiatan diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya. Laporan pelaksanaan ini disusun dan disampaikan kepada Kepala Pusbindiklatren menyesuaikan garis waktu masing-masing kegiatan. Selama tahun berjalan, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap kegiatan yang diselenggarakan Pusbindiklatren sehingga ada beberapa kegiatan baru yang ditambahkan.

D. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Jumlah alokasi anggaran Pusbindiklatren tahun 2023 adalah **Rp82.289.430.000,00** yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp44.621.887.000,00; SMART sebesar Rp50.000.000,00; Lintas Bidang sebesar Rp6.895.618.000,00; serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk PHRD IV sebesar Rp30.721.925.000,00.

BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Peran Pusbindiklatren dalam Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD

Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan nasional adalah mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah proses penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tujuan sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah untuk menciptakan keselarasan, keterpaduan, dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan dampak positif bagi masyarakat. Untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan, diperlukan beberapa koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan.

Bertepatan dengan momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan antara pusat dan daerah, diperlukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah. Kementerian PPN/Bappenas memiliki tanggung jawab mendiseminasi. menginternalisasi, dan menjamin implementasi RPJP Nasional (RPJPN) di daerah. Selain itu, dalam rangka menjaga kualitas dokumen perencanaan, diperlukan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap RPJPN 2025—2045 bagi aparatur pemerintah daerah, terutama bagi Para Perencana. Melalui pendampingan, diharapkan juga terjadi keselarasan, integrasi, dan koordinasi implementasi RPJPN antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti kebutuhan sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan darah tersebut, pada tahun 2023, Pusbindiklatren menginisiasi kegiatan Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD. Tujuan kegiatan ini diantaranya adalah

1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman RPJPN 2025—2045 kepada aparatur pemerintah daerah;

2) meningkatkan keselarasan, integrasi, dan koordinasi implementasi RPJPN 2025—2045 antara Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah; dan
3) membantu penyusunan RPJPD atau dokumen lainnya di daerah selaras dengan rpjpn 2025-2045.

Terdapat empat sub-kegiatan dalam Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Kegiatan Pendampingan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD

Kegiatan	Penyusunan Desain dan Kurikulum	*Training of Facilitator*	Pelatihan/ Pendampingan Provinsi
Tujuan	Menyusun desain dan materi TOT dan pendampingan Menyusun kurikulum dan materi RPJPN di *Training of Facilitator* (TOF)	Menyiapkan modul dan bahan ajar memberikan pembekalan calon pengajar/instruktur pendampingan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan menyusuan RPJPD 2025—2045
Peserta	Tim Inti dari Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri dari Perencana Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Utama, dan Tenaga Ahli Profesional	Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Dalam Negeri Beberapa Bappeda atau yang sejenis, level provinsi Peserta dari pihak lain yang terkait	Perencana dari Bappeda atau yang sejenis, level provinsi
Perkiraan jumlah peserta	20 orang	20—50 orang	200 orang
Instruktur	Tim Inti Penyusun RPJPN dan Tenaga Ahli Profesional	Perencana Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Utama, dan Tenaga Ahli Profesional	Tim nasional yang telah mengikuti ToF
Durasi	1 bulan dengan tambahan pelaksanaan *workshop* selama 3 hari	1 bulan dengan tambahan pelaksanaan *workshop* selama 5 hari	5 hari dengan alternatif sistem *on-off*
Bentuk kegiatan	Rapat dan *workshop* luring	Rapat dan *workshop* luring	Pelatihan luring dan daring

Kegiatan	Penyusunan Desain dan Kurikulum	*Training of Facilitator*	Pelatihan/ Pendampingan Provinsi
Output	Desain dan kurikulum ToF Modul ToF Pengajar ToF	Modul pendampingan Pengajar nasional	bertambahnya jumlah Perencana yang terlatih dalam menyusun dokumen perencanaan, khususnya RPJP

Pusbindiklatren mengawali kegiatan Pendampingan dan Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD dengan melakukan penyusunan desain kegiatan dan kurikulum ToF yang dituangkan dalam modul. Kemudian, akan dilakukan *Training of Facilitator* (ToF) untuk para pengajar nasional. Setelah terbentuk tim pengajar nasional, maka selanjutnya akan dilakukan pelatihan/pendampingan ke pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD.

B. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2023

1. Capaian Indikator Kinerja (sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023)

Pada tahun 2023, Pusbindiklatren memiliki sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut merupakan detail capaian indikator kinerja Pusbindiklatren pada tahun 2023 berdasarkan Sasaran Strategis/Program dan IKU Pusbindiklatren.

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Pusbindiklatren 2023

No.	Sasaran Strategis/Program	Sasaran Kegiatan/*Output*	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional **Indikator SS 1.1** Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi	75%	90,95%	Melampaui Target
			Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan	80%	81,93%	Melampaui Target
			Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	94%	99,92%	Melampaui Target
2	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan	Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan	90—94.9%	100%	Melampaui Target

No.	Sasaran Strategis/Program	Sasaran Kegiatan/*Output*	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Indikator SS 3.2 Persentase inovasi kebijakan pembinaan JFP dan pengembangan pendidikan dan pelatihan perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencana pembangunan	Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan	Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan			
3	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional, dan didukung oleh kapabilitas SDM **Indikator SS 4.1** Indeks reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	85	96,10	Melampaui Target
		Manajemen Internal	Persentase tata kelola lingkup Pusbindiklatren yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku	100%	100%	Mencapai Target
			Persentase pengelolaan realisasi anggaran lingkup Pusbindiklatren	92%	99,38%	Melampaui Target
4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional, dan didukung oleh kapabilitas SDM	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	92	96,12	Melampaui Target

No.	Sasaran Strategis/Program	Sasaran Kegiatan/*Output*	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
	Indikator SS 4.1 Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan manajemen perencanaan	Manajemen Internal	Persentase Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Pusbindiklatren yang sesuai dengan tugas dan fungsi	92%	100%	Melampaui Target

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, realisasi pencapaian sembilan IKU Pusbindiklatren telah berhasil melampaui target capaian. Penjelasan lebih rinci dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut.

a. Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi

Pusbindiklatren merupakan unit kerja pelaksana tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional yang berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas yang mengemban tugas sebagai Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Perencana. Target capaian dari indikator jumlah persentase perencana yang lulus uji kompetensi pada tahun 2023 adalah sebesar 75%. Penghitungan indikator ini didapatkan dari peserta uji kompetensi dari Fungsional Perencana yang akan naik jenjang dan peserta pelatihan fungsional perencana ahli pertama yang mengikuti uji kompetensi pada akhir pelatihan.

Uji kompetensi JFP di tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 kali pelaksanaan, yaitu di bulan April, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan Oktober 2023. Jika dilihat berdasarkan data hingga pelaksanaan uji kompetensi di Oktober 2023, total peserta uji kompetensi yang lolos verifikasi pendaftaran dan dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan uji kompetensi yaitu sebanyak 2.416 orang. Jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren yaitu sebanyak 2.193 orang. Dari 2.193 peserta uji kompetensi tersebut, untuk uji kompetensi yang dilakukan melalui mekanisme pelatihan telah diikuti oleh seluruh peserta pelatihan yaitu sebanyak 322 orang. Berikut rincian jumlah peserta Uji Kompetensi di tahun 2023.

Tabel 3.3 Jumlah Peserta Uji Kompetensi Tahun 2023

KEGIATAN		PENILAIAN UJI KOMPETENSI				
		JUMLAH PESERTA			PERSENTASE	
		Dipanggil	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
Uji Kompetensi		**2.094**	**1.871**	**223**	**89,35%**	**10,65%**
1	Uji Kompetensi JFP Ahli Utama	14	12	2	85,71%	14,29%
2	Uji Kompetensi JFP Ahli Madya	166	155	11	93,37%	6,63%
3	Uji Kompetensi JFP Ahli Muda	605	547	58	90,41%	9,59%
4	Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama	1.309	1.157	152	88,39%	11,61%
Uji Kompetensi melalui Pelatihan		**322**	**322**	**0**	**100%**	**00,00%**
1	Fungsional Ahli Pertama	200	200	0	100,00%	00,00%
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama (Mandiri)	122	122	0	100,00%	00,00%
Total Keseluruhan		**2.416**	**2.193**	**223**	**90,77%**	**9,23%**

**Untuk pelaksanaan Uji kompetensi Ahli Utama, 2 peserta terhitung tidak hadir dikarenakan dinyatakan tidak lulus dari Seleksi Awal.*

Dari total 2.193 orang peserta yang hadir dalam pelaksanaan uji kompetensi, jumlah peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus uji kompetensi yaitu sejumlah 1.520 peserta (69,31%) dan peserta yang dinyatakan tidak lulus yaitu sebanyak 673 orang peserta (30,69%). Untuk tingkat kelulusan uji kompetensi dari mekanisme pelatihan, sebanyak 322 orang berhasil dinyatakan lulus uji kompetensi (100%). Jika dilihat secara keseluruhan (hasil penjumlahan dari kelulusan uji kompetensi melalui pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren, tingkat kelulusan uji kompetensi JFP di tahun 2023 sebesar 69,31%. Berikut merupakan data capaian tingkat kelulusan Uji Kompetensi JFP.

Tabel 3.4 Jumlah Kelulusan Peserta Uji Kompetensi JFP Tahun 2023

KEGIATAN		PENILAIAN UJI KOMPETENSI				
		JUMLAH PESERTA			PERSENTASE	
		Mengikuti	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
Uji Kompetensi		**1.871**	**1.198**	**673**	**64,03%**	**35,97%**
1	Uji Kompetensi JFP Ahli Utama	12	5	7	41,67%	58,33%
2	Uji Kompetensi JFP Ahli Madya	155	103	52	66,45%	33,55%

KEGIATAN		PENILAIAN UJI KOMPETENSI				
		JUMLAH PESERTA			PERSENTASE	
		Mengikuti	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
3	Uji Kompetensi JFP Ahli Muda	547	324	223	59,23%	40,77%
4	Uji Kompetensi JFP Ahli Pertama	1157	766	391	66,21%	33,79%
Uji Kompetensi Melalui Pelatihan		**322**	**322**	**0**	**100,00%**	**00,00%**
1	Pelatihan Fungsional Ahli Pertama	200	200	0	100,00%	00,00%
2	Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama (Mandiri)	122	122	0	100,00%	00,00%
Total Keseluruhan		**2.193**	**1.520**	**673**	**69,31%**	**30,69%**

Jumlah dan persentase kelulusan diatas merupakan data keseluruhan peserta uji kompetensi JFP. Jika dihitung berdasarkan jumlah perencana yang mengikuti uji kompetensi, persentase kelulusan perencana yang mengikuti uji kompetensi mencapai 90,95 persen. Persentase ini berasal dari jumlah perencana yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang dan uji kompetensi melalui Pelatihan (khusus untuk Fungsional Perencana Ahli Pertama yang menjadi perencana dari formasi CPNS Jabatan Fungsional Perencana). Berikut merupakan data persentase perencana yang lulus uji kompetensi JFP Tahun 2023.

Tabel 3.5 Jumlah Kelulusan Uji Kompetensi JFP bagi Perencana Tahun 2023

KEGIATAN		PENILAIAN UJI KOMPETENSI				
		JUMLAH PESERTA			PERSENTASE	
		Mengikuti	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
Uji Kompetensi		**153**	**110**	**43**	**71,90%**	**28,10%**
1	Uji Kompetensi JFP Ahli Madya	62	44	18	70,97%	29,03%
2	Uji Kompetensi JFP Ahli Muda	91	66	25	72,53%	27,47%
Uji Kompetensi Melalui Pelatihan		**322**	**322**	**0**	**100,00%**	**00,00%**
1	Pelatihan Fungsional Ahli Pertama	200	200	0	100,00%	00,00%
2	Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama (Mandiri)	122	122	0	100,00%	00,00%
TOTAL KESELURUHAN		**475**	**432**	**43**	**90,95%**	**9.05%**

Berdasarkan tabel data diatas, terlihat bahwa persentase perencana yang lulus uji kompetensi di Pusbindiklatren telah mencapai target capaian indikator kinerja utama

Pusbindiklatren yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari target capaian sebesar 75 persen, capaian IKU ini telah melampaui target tersebut pada tahun 2023.

b. Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan

Formula yang digunakan dalam pengukuran persentase karyasiswa yang lulus pendidikan adalah dengan membandingkan jumlah realisasi karyasiswa yang dijadwalkan lulus pada tahun berjalan dengan jumlah target karyasiswa yang dijadwalkan lulus pada tahun berjalan. Capaian indikator persentase karyasiswa yang lulus pendidikan dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
Realisasi karyasiswa yang dijadwalkan lulus pada tahun berjalan	272
Target karyasiswa yang dijadwalkan lulus pada tahun berjalan	332
PERSENTASE KARYASISWA YANG LULUS PENDIDIKAN	**81,93%**

Berdasarkan Tabel 3.6, dapat diketahui bahwa ketercapaian indikator persentase karyasiswa yang lulus pendidikan adalah 81,93%. Capaian indikator tersebut telah melampaui target kinerja Pusbindiklatren tahun 2023, yaitu 80%. Rincian komponen pencapaian indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Jumlah Target dan Realisasi Karyasiswa yang Dijadwalkan Lulus Pendidikan Tahun 2022

Tahun Penempatan (angkatan)	Program	Jumlah Target Karyasiswa Lulus	Jumlah Realisasi Karyasiswa Lulus
2021	S-2 Dalam Negeri	265	222
	S-2 Dalam Negeri Afirmasi	25	21
	S-2 Dalam Negeri Tematik	22	18
	S-2 *Linkage* SSMP	14	5
2020	S-1 *Partially Funded* (internal Bappenas)	4	4
2019	S-1 *Partially Funded* (internal Bappenas)	2	2
TOTAL		**332**	**272**

Tabel 3.7 menunjukkan rincian jumlah target dan realisasi karyasiswa yang dijadwalkan lulus program pendidikan pada tahun 2023. Karyasiswa yang dijadwalkan untuk lulus di tahun 2023 secara umum merupakan karyasiswa program pendidikan S-2 dari angkatan tahun 2021. Di samping itu, terdapat karyasiswa program pendidikan S-1 melalui skema *partially funded* yang lulus pada tahun 2023 sebanyak 6 orang dari angkatan 2020 dan 2019. Program *partially funded* yang diselenggarakan pada tahun ini merupakan program beasiswa untuk pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang melanjutkan studi ke jenjang S-1. Secara keseluruhan, terdapat 272 orang karyasiswa yang berhasil lulus dari total 332 orang karyasiswa yang dijadwalkan untuk lulus pada tahun 2023.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaklulusan karyasiswa yang ditargetkan lulus pada tahun 2023 di antaranya adalah kesulitan dalam melakukan publikasi ilmiah sebagai syarat sidang maupun kelulusan, persyaratan tambahan untuk kelulusan bagi karyasiswa *linkage,* serta berbagai faktor non-akademis dari tiap-tiap karyasiswa. Sebagai pemberi beasiswa, Pusbindiklatren telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kelulusan karyasiswa di antaranya dengan melakukan pemantauan progres penyelesaian studi karyasiswa, pemantauan karyasiswa zona merah (yang telah mendekati dan melewati batas waktu studi), memfasilitasi keperluan publikasi ilmiah karyasiswa melalui jurnal yang dikelola Pusbindiklatren, serta secara aktif berkomunikasi dengan program studi maupun karyasiswa untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama masa studi.

c. Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan

Pada tahun 2023, Pusbindiklatren menyelenggarakan Pelatihan Teknis Perencanaan, Pelatihan Spesifik Perencanaan, Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama, Pelatihan Luar Negeri, serta *On The Job Training*. Capaian kelulusan peserta pelatihan, tidak mengikutsertakan Pelatihan Fungsional Perencana dikarenakan *output* dari Pelatihan Fungsional Perencana yang diselenggarakan Pusbindiklatren sudah tercakup dalam capaian IKU Perencana yang lulus uji kompetensi.

Pada tahun 2023 jumlah peserta pelatihan yang lulus dihitung dari peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren dan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri oleh tiap-tiap instansi melalui kerja sama dengan Pusbindiklatren. Jumlah peserta pelatihan yang lulus adalah 1.234 orang atau 99,92% dari total peserta 1.235 orang yang mengikuti pelatihan. Realisasi peserta pelatihan yang lulus pelatihan dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi Peserta Pelatihan yang Lulus Pelatihan Tahun 2023

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah Peserta yang Lulus Pelatihan	Persentase
PELATIHAN DALAM NEGERI		**325**	**324**	**99,69%**
Pelatihan Teknis				
1	*Monitoring* dan Evaluasi	25	25	100%
2	RPJMD	77	76	98,70%
3	Perencanaan dan Penganggaran	50	50	100%
Pelatihan Spesifik				
4	Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan	49	49	100%
5	Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah	25	25	100%
6	Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan	25	25	100%
7	Kelayakan Proyek	25	25	100%
8	Perencanaan Penanggulangan Bencana	49	49	100%
PELATIHAN LUAR NEGERI		**157**	**157**	**100%**
1	*The Executive Development Programme*	77	77	100%
2	*Public Administration for Green Economy Development (Workshop 2)*	80	80	100%
***ON THE JOB TRAINING* (OJT)**		**38**	**38**	**100%**
1	*On the Job Training* Dalam Negeri	14	14	100%
2	*On the Job Training* Luar Negeri	6	6	100%
3	*On the Job Training* USAID Kolaborasi	18	18	100%
Total Pelatihan Dalam, Luar Negeri, dan OJT		**520**	**519**	**99,81%**
PELATIHAN MANDIRI		**715**	**715**	**100%**
1	Pelatihan Teknis	715	715	100%
TOTAL PELATIHAN		**1.235**	**1.234**	**99,92%**

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, terdapat delapan topik pelatihan teknis dan spesifik yang diselenggarakan Pusbindiklatren. Pelatihan teknis perencanaan yang diselenggarakan adalah Pelatihan *Monitoring* dan Evaluasi, RPJMD, serta Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran. Pelatihan spesifik yang diselenggarakan adalah Pelatihian Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan, Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah, Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan, Pelatihan Kelayakan Proyek, dan Pelatihan Perencanaan Penanggulangan Bencana.

Pelatihan Luar Negeri yang diselenggaran pada tahun 2023 sebanyak dua pelatihan, yaitu *The Executive Development Program* dan *Public Administration for Green Economy*. Kedua pelatihan tersebut dibiayai melalui hibah dengan skema pembiayaan *cost sharing* antara Pusbindiklatren dengan lembaga pemberi hibah.

Pada tahun 2023, Pusbindiklatren juga menyelenggarakan *pilot project On the Job Training* (OJT) yang mencakup OJT Dalam Negeri, OJT Luar Negeri dan OJT USAID Kolaborasi. OJT dalam negeri diselenggarakan dengan menempatkan peserta OJT di instansi, baik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun instansi nonpemerintah. OJT luar negeri diselenggarakan di Jepang melalui kerja sama dengan tiga instansi, yaitu Ritsumeikan University, Hiroshima University, dan Japan International Cooperation Center (JICE). OJT USAID Kolaborasi merupakan program OJT melalui pendanaan hibah USAID yang khusus ditujukan untuk ASN di wilayah Papua. OJT USAID Kolaborasi tahun 2023 diselenggarakan oleh Pusbindiklatren dan Wahana Visi Indonesia dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

d. Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan

Pusbindiklatren, dalam menjalankan tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, menghasilkan inovasi-inovasi kebijakan untuk meraih hasil yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Inovasi kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan perencana adalah kebijakan inovatif yang dihasilkan Pusbindiklatren untuk selanjutnya diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran. Kamus yang digunakan dalam pengukuran persentase tersebut adalah jumlah inovasi kebijakan/program pembinaan JFP dan pengembangan diklat yang diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan institusi/unit kerja sasaran dibandingkan dengan jumlah inovasi kebijakan program pembinaan JFP dan pengembangan diklat yang dihasilkan. Daftar Inovasi yang dihasilkan dan Persentase Inovasi Kebijakan yang diimplementasikan oleh Pusbindiklatren dan Institusi/Unit Kerja Sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Persentase Inovasi Kebijakan yang Diimplementasikan oleh Pusbindiklatren Institusi/Unit Kerja Sasaran Tahun 2023

No	Inovasi Kebijakan/Program 2023	Dihasilkan	Diimplementasikan
1	Program pelatihan bauran	✓	✓
2	Program pendidikan *cost sharing*	✓	✓
3	*On the Job Training*	✓	✓
4	Kebijakan S-2 Regular Plus	✓	✓

No	Inovasi Kebijakan/Program 2023	Dihasilkan	Diimplementasikan
5	Kebijakan pemberian tunjangan hidup kepada penerima beasiswa pendidikan Pusbindiklatren	✓	✓
6	Kebijakan beasiswa pendidikan bagi PNS dengan disabilitas fisik	✓	✓
7	Penghitungan kebutuhan formasi JFP	✓	✓
8	Tata cara pengumpulan DUPAK	✓	✓
9	Penyusunan dokumen Hasil Kerja Minimal (HKM) JFP	✓	✓
10	Tata cara pendaftaran dan pelaksanaan uji kompetensi JFP	✓	✓
11	Pembekalan Uji Kompetensi	✓	✓
Jumlah		**11**	**11**
Persentase Inovasi Kebijakan Diimplementasikan		**100 %**	

Berdasarkan perjanjian kinerja, indikator inovasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90—94,9%. Pada tahun 2023 Pusbindiklatren telah menghasilkan 11 inovasi kebijakan dan seluruhnya telah berhasil diimplementasikan atau dapat dikatakan pencapaian indikator ini adalah 100%.

e. Tingkat Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan dalam Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tahun 2023 bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencana pusat dan daerah melalui penerapan transparansi dan standar pelayanan publik. Penerapan transparansi ini termasuk diantaranya ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik, ketersediaan SOP dan pedoman yang dapat diakses oleh publik, pengelolaan keluhan yang dapat diakses oleh publik, dan penyusunan laporan yang dapat diakses oleh publik. Formula yang digunakan adalah capaian hasil survei penilaian *stakeholder* terhadap penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pada rentang waktu 1 Januari–31 Desember tahun 2023, Pusbindiklatren membagikan survei pelayanan publik. Berdasarkan survei pelayanan publik tersebut, disusunlah indeks kepuasan masyarakat yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik agar lebih sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. IKM dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. IKM dihitung dengan rumus:

IKM = (Nilai Persepsi - Nilai Minimal)/(Nilai Maksimal - Nilai Minimal) x 100

Dalam menghitung capaian IKU penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Pusbindiklatren menggunakan komponen kuesioner penyelenggaraan programam pendidikan, kuesioner penyelenggaraan program pelatian, serta komponen dari IKM. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Tingkat Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan dalam Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	Nilai
PROGRAM PENDIDIKAN	**98,65**
Informasi Pendidikan Pusbindiklatren dan Akses Terhadapnya	97,97
Penjelasan Informasi Terkait Hak yang Diperoleh Karyasiswa Selama Menerima Beasiswa Pusbindiklatren	98,50
Pelayanan Staf Pusbindiklatren Sesuai Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN	100,00
Penjelasan Informasi Terkait dengan Pembayaran yang Dilakukan Kepada Karyasiswa	98,15
PELATIHAN	**92,50**
Informasi Pelatihan Pusbindiklatren dan Akses terhadapnya	93,00
Proses Seleksi (Tranparansi)	92,00
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	**97,13**
Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	94,42
Biaya/Tarif Dalam Pelayanan	99,84
TOTAL	**96,10**

Berdasarkan Tabel 3.10 diketahui bahwa nilai transparansi dan standar pelayanan dalam pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 96,10. Nilai ini telah melampuai target capaian yang ada pada perjanjian kinerja Kapusbindiklatren tahun 2023. Nilai dari tiap-tiap komponen, yaitu (1) penyelenggaraan program pendidikan sebesar 98,65; (2) penyelenggaraan program pelatihan sebesar 92,50; dan (3) IKM sebesar 97,13.

f. Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Lingkup Pusbindiklatren yang Sesuai dengan Ketentuan dan Aturan yang Berlaku

Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Lingkup Pusbindiklatren yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku bertujuan untuk mengukur peran Pusbindiklatren dalam melaksanakan kegiatan tata kelola. Adapun tata kelola adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pusbindiklatren untuk mendukung capaian organisasi. Kegiatan ini diantaranya adalah dukungan untuk Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas (ZI), dan Proses Bisnis.

Tabel 3.11 Pelaksanaan Tata Kelola di Lingkup Pusbindiklatren

No	Tata Kelola	Rencana	Pelaksanaan
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	✓	✓
2	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	✓	✓
3	Pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	✓	✓
4	Pelaksanaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)	✓	✓
5	Pelaksanaan Proses Bisnis	✓	✓
6	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	✓	✓
Jumlah		**6**	**6**
PERSENTASE PEMENUHAN DIREKTIF PIMPINAN		**100%**	

Pada pelaksanaannya di tahun 2023, dari segi dukungan dalam tata kelola Kementerian, Pusbindiklatren telah melaksanakan 100% dukungan terhadap pelaksanaan tata kelola yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, yakni

1) dalam pelaksanaan RB terutama dari segi komponen pelayanan publik;
2) dalam hal pelaksanaan SPIP, Pusbindiklatren menjadi Ketua Satuan Tugas Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan telah selesai menyusun Laporan Pelaksanaan SPIP Semester 1 Tahun 2023;
3) dari segi pelaksanaan ZI, Pusbindiklatren selalu menyampaikan komitmen menjunjung tinggi WBK dan menuju WBBM dalam setiap agenda kegiatan serta produk publikasi yang dihasilkan;
4) dari segi pelaksanaan SPBE, Pusbindiklatren membantu dalam proses pemetaan arsitektur di Kementerian PPN/Bappenas;
5) dari segi pelaksanaan Proses Bisnis, Pusbindiklatren turut serta aktif dalam proses penyusunan untuk mendukung agenda Kementerian;

6) dari segi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pusbiindiklatren menyampaikan laporan kinerja tahunan secara umum melalui situs *web* Pusbindiklatren.

g. Persentase Pengelolaan Anggaran Lingkup Pusbindiklatren

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi anggaran lingkup Pusbindiklatren pada tahun berjalan dengan jumlah pagu anggaran lingkup Pusbindiklatren pada tahun berjalan. Hasil capaian indikator ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Persentase Pengelolaan Anggaran Lingkup Pusbindiklatren 2023

Tahun	Jumlah Realisasi	Jumlah Pagu	Persentase
2023	Rp81.776.813.323,00	Rp82.286.430.000,00	99,38%

Berdasarkan Tabel 3.12 capaian realisasi pengelolaan anggara lingkup Pusbindiklatren adalah 99,38% dari total pagu Rp82.286.430.000,00. Capaian ini telah melampaui target dari perjanjian kinerja yaitu sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di lingkup Pusbindiklatren dapat dikatakan telah optimal.

h. Tingkat Kepuasan atas Layanan Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan merupakan IKU untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan Pusbindiklatren dalam penyelenggaraan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan terhadap Perencana pusat dan daerah. Penghitungan indikator ini didasarkan pada hasil kuesioner yang dibagikan pada karyasiswa program pendidikan, peserta program pelatihan, serta penerima layanan Pusbindiklatren yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pelayanan tatap muka. Hasil penilaian kepuasan.

Tabel 3.13 Tingkat Kepuasan atas Layanan dalam Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	Nilai
PROGRAM PENDIDIKAN	**98,09**
Penyampaian informasi terkait ketentuan program pendidikan dari Petugas Pemantau	98.20

Indikator	Nilai
Pelayanan informasi pendidikan yang dilakukan oleh Staf Pusbindiklatren	97.60
Kualitas pelayanan informasi staf Pusbindiklatren	100.00
Penyampaian informasi terkait ketentuan program pendidikan dari Petugas Pemantau	96.30
Pelayanan pengaduan keluhan karyasiswa selama perkuliahan oleh Petugas Pemantau	98.15
Fitur Sistem Informasi Diklat (Simdiklat) yang disediakan Pusbindiklatren	100.00
Pelayanan Pusbindiklatren	98.15
Pelayanan lain-lain selama proses studi dari Pusbindiklatren	100.00
Penjelasan terkait dengan pembayaran tunjangan dari Pusbindiklatren	94.44
PROGRAM PELATIHAN	**91,80**
Kualitas pelayanan staf Pusbindiklatren	91.00
Pelayanan informasi pelatihan yang dilakukan oleh staf Pusbindiklatren	94.00
Kualitas informasi staf Pusbindiklatren	98.00
Pendaftaran pelatihan dilakukan berbasis *web* (*online*)	97.00
Penempatan peserta pelatihan	94.00
Sistematika kurikulum pelatihan dan beban jam pelajaran untuk tiap-tiap materi	81.00
Penyajian materi sudah runtut dan mudah dipahami	94.00
Proporsi materi pelatihan	82.00
Relevansi materi pelatihan untuk diterapkan di instansi asal peserta	92.00
Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pelatihan	95.00
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	**95,01**
Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	96.68
Pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	94.70
Kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan	91.66

Indikator	Nilai
Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	95.44
Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	95.75
Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	96.25
Kualitas sarana dan prasarana	94.61
E-TAMU	**99,56**
Kepuasan pelayanan tatap muka	99,56
TOTAL	**96,12**

Tabel 3.13 menunjukkan tingkat kepuasan dari penyelenggaraan program pelatihan Pusbindiklatren 2023 sebesar 96,12. Komponen penilaian dilihat dari tingkat kepuasan program pendidikan sebesar 98,09; tingkat kepuasan program pelatihan sebesar 91,80; tingkat kepuasan berdasarkan IKM sebesar 95,01; serta tigkat kepuasan pelayanan tatap muka pada data e-tamu sebesar 99,56.

i. Persentase Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Pusbindiklatren yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi

Indikator persentase pemenuhan direktif pimpinan lingkup Pusbindiklatren yang sesuai dengan tugas dan fungsi diukur dengan membandingkan jumlah penugasan lain yang diberikan pimpinan dan selesai dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi terhadap jumlah penugasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi. Pimpinan yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri serta Eselon I di tingkat Kementerian PPN/Bappenas. Daftar penugasan lain yang diberikan kepada Pusbindiklatren terdapat dalam Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Pemenuhan Direktif Pimpinan di Lingkup Pusbindiklatren

No	Penugasan	Diberikan	Dilaksanakan
1	Pendampingan Penyelarasan RPJPN-RPJPD ➔ dalam tahap persipan: pembentukan tim, penunjukan tenaga ahli penyusunan modul, penyusunan desain pendampingan	✓	✓

No	Penugasan	Diberikan	Dilaksanakan
2	Peningkatan Kapasitas SDM Internal Kementerian PPN/Bappenas ➔ progam pendidikan *partially funded*, program pelatiihan *partially funded*, penyusunan desain pelatihan (pelatihan Evaluasi RPJMN, Pelatihan Geopark, Pelatihan Jasa Konsultasi Nonkonstruksi, Sistem Perlindungan Anak) ➔ perlu koordinasi dengan Biro SDM dan Biro Renortala mengenai mekanisme pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM Internal Kementerian PPN/Bappenas	✓	✓
3	Pemetaan Beban Kerja Widyaiswara	✓	✓
4	Pemenuhan Pengusulan Formasi Widyaiswara	✓	✓
5	Pelaksanaan Pelatihan Topik Khusus Pendukung Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	✓	✓
6	Dukungan Pelaksanaan Program MBKM Desa Cemara	✓	✓
7	Ketua Satgas SPIP	✓	✓
Jumlah		**7**	**7**
PERSENTASE PEMENUHAN DIREKTIF PIMPINAN		**100 %**	

Selama tahun 2023, Pusbindiklatren melaksanakan tujuh penugasan direktif pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusbindiklatren. Persentase capaian pemenuhan direktif pimpinan adalah sebesar 100 persen. Semua penugasan yang diberikan kepada Pusbindiklatren telah berhasil dilaksanakan, namun beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dikarenakan menyesuaikan *timeline* tahapan pada kegiatan tersebut.

Penugasan direktif pimpinan yang berada dalam lingkup peningkatan kapasitas SDM Perencana meliputi kegiatan pendampingan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN, peningkatan kapasitas SDM internal Kementerian PPN/Bappenas, dan pelaksanaan pelatihan topik khusus pendukung fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Namun, kegiatan program MBKM Desa Cemara merupakan kegiatan terkait non perencanaan dengan target peserta mahasiswa yang sedang studi di jenjang S-1 di beberapa universitas mitra. Perkembangan pelaksanaan untuk seluruh kegiatan meliputi penyusunan desain hingga pelaksanaan kegiatan.

Di samping itu, terdapat penugasan direktif pimpinan yang berada dalam lingkup manajemen dan akuntabilitas internal organisasi yaitu pemetaan beban kerja dan usulan formasi jabatan fungsional widyaiswara Bappenas serta penugasan sebagai ketua satgas SPIP di lingkup Sekretariat Kementerian. Output dari kegiatan tersebut adalah berupa analisis beban kerja dan usulan formasi jabatan fungsional widyaiswara yang disampaikan kepada instansi pembina, yaitu Lembaga Administrasi Negara

(LAN). Sementara sebagai Ketua Satgas SPIP, Pusbindiklatren telah menyusun Laporan dan Pemutakhiran SPIP Tahun 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan 2022

Dikarenakan adanya pemutakhiran IKU pada tahun 2023, terdapat penambahan indikator kinerja dan perubahan pengukuran indikator. Perbandingan capaian kinerja tidak dapat dilakukan dengan komprehensif untuk semua IKU 2023. IKU yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya merupakan tambahan IKU terkait manajemen internal yaitu (1) persentase pelaksanaan tata kelola lingkup Pusbindiklatren yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku; dan (2) persentase pemenuhan direktif pimpinan lingkup Pusbindiklatren yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rincian perbandingan pencapaian IKU 2023 dengan IKU 2022 terdapat dalam uraian berikut ini.

a. Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi

Perbandingan capaian perencana yang lulus uji kompetensi pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah pejabat fungsional perencana yang akan naik jenjang jabatan dan peserta pelatihan fungsional perencana ahli pertama. Capaian jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi, jumlah peserta yang lulus uji kompetensi dan persentase kelulusan peserta uji kompetensi pada tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Perencana yang Lulus Uji Kompetensi Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Perencana yang lulus uji kompetensi	Perencana yang mengikuti uji kompetensi	Persentase Perencana yang Lulus Uji Kompetensi
2023	432	475	90,95%
2022	353	394	89,59%

Berdasarkan tabel perbandingan kelulusan peserta uji kompetensi Pusbindiklatren, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat kenaikan persentase kelulusan pada tahun 2023. Pada tahun 2022, persentase kelulusan adalah sebesar 89,59% dan meningkat sebesar 1,36% pada tahun 2023. Peningkatan jumlah kelulusan peserta uji kompetensi ini didorong salahsatunya oleh adanya pelaksanaan uji kompetensi mandiri oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pelaksanaan uji kompetensi secara mandiri didahului oleh pemberian materi dan pembekalan bagi peserta secara intensif sehingga meningkatkan kesiapan dan kemampuan peserta untuk lulus dalam uji kompetensi jabatan fungsional perencana.

b. Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan

Perbandingan capaian persentase karyasiswa yang lulus pendidikan pada tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Perbandingan Jumlah Kelulusan Karyasiswa Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Jumlah Realisasi Karyasiswa yang DijadwalkanLulus pada Tahun Berjalan	Jumlah Target Karyasiswa yang DijadwalkanLulus pada Tahun Berjalan	Persentase Karyasiswa yang Lulus Pendidikan
2023	272	332	81,93%
2022	276	362	84,66%

Capaian persentase karyasiswa yang lulus pendidikan pada tahun 2023 mengalami penurunan dari capaian pada tahun 2022. Hal ini dapat disebabkan oleh masa transisi pembelajaan perkuliahan secara daring dikarenakan adanya pandemi ke pembelajaran secara luring. Upaya yang dilakukan Pusbindiklatren untuk mendorong tingkat kelulusan karyasiswa adalah pemantauan karyasiswa zona merah. Selain itu, Pusbindiklatren juga melakukan pengendalian dengan menemui karyasiswa yang mengalami masalah dalam penyelesaian studi dan pengelola program studi dari karyasiswa tersebut.

c. Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan Lulus Program Pelatihan

Perbandingan penghitungan capaian peserta yang lulus pelatihan dilakukan dengan menggunakan data kelulusan peserta pada pelatihan nonfungsional. Perbandingan capaian pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.17.

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Peserta Terlatih Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Peserta yang Lulus Pelatihan	Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Persentase Peserta Pelatihan yang Mengikuti dan lulus Program Pelatihan
2023	1.234	1.235	99,92%
2022	992	991	99,91%

Berdasarkan Tabel 3.17 capaian persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,01% dibandingkan capaian tahun 2022. Di samping itu, jumlah peserta pelatihan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal

ini dikarenakan pada tahun 2023 Pusbindiklatren lebih banyak menyelenggarakan fasilitasi pelatihan mandiri kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pelatihan mandiri merupakan pelatihan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pusbindiklatren dengan menggunakan pendanaan dari anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

d. Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan JFP dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang Dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan

Perbandingan capaian IKU persentase inovasi kebijakan pembinaan JFP dan pengembangan pendidikan dan pelatihan perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencana pembangunan antara tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Inovasi Kebijakan Pusbindiklatren Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Jumlah Inovasi kebijakan yang Diimplementasikan	Jumlah Inovasi Kebijakan yang Dihasilkan	Persentase
2023	1.234	1.235	99,92%
2022	992	991	99,91%

Berdasarkan Tabel 3.18 dapat diketahui bahwa capaian persentase inovasi kebijakan pembinaan JFP dan pengembangan pendidikan dan pelatihan perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencana pembangunan tidak mengalami perubahan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100 persen. Namun apabila dilihat adi jumlah inovasi kebijakan yang dihasilkan, pada tahun 2023 Pusbindiklatren menghasilkan lebih banyak inovasi kebijakan dbandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 Pusbindiklatren menghasilkan sebanyak 11 inovasi kebijakan sedangkan pada tahun 2022 Pusbindiklatren menghasilkan sebanyak 8 inovasi kebijakan.

e. Tingkat Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan dalam Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pengukuran indikator ini pada tahun 2023 maupun 2022 didasarkan pada hasil kuesioner pada program dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren. Perbandingan capaian tingkat kepuasan tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Perbandingan Tingkat Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan Pusbindiklatren Tahun 2023 dan 2022

Keterangan	Nilai
Total Capaian Tingkat PenerapanTransparansi dan Standar Pelayanan Pusbindiklatren Tahun 2023	96,10
Total Capaian Tingkat PenerapanTransparansi dan Standar Pelayanan Pusbindiklatren Tahun 2022	94,42

Dari Tabel 3.19 dapat diketahui terjadi peningkatan capaian kepuasan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Peningkatan nilai capaian tingkat penerapan transparansi dan standar pelatihan dalam pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 1,68 yaitu dari 94,42 menjadi 96,10.

f. Persentase Pengelolaan Realisasi Anggaran Lingkup Pusbindiklatren

Pengukuran indikator ini didasarkan pada tingkat realisasi pengelolaan anggaran pada tahun 2023 dan 2022. Perbandingan capaian tingkat kepuasan tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Perbandingan Persentase Pengelolaan Realisasi Anggaran Pusbindiklatren Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Realisasi (Rp)	Alokasi (Rp)	Persentase
2023	81.776.813.323	82.286.430.000	99,38%
2022	64.837.013.689	74.210.726.000	87,37%

Bedasarkan Tabel 3.20 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian persentase realisasi pengelolaan anggaran pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

g. Tingkat Kepuasan atas Layanan Pembinaan JFP dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pengukuran indikator ini pada tahun 2023 maupun 2022 didasarkan pada hasil kuesioner pada program dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren. Perbandingan capaian tingkat kepuasan tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Perbandingan Tingkat Kepuasan Layanan Pusbindiklatren Tahun 2023 dan 2022

Keterangan	Nilai
Total Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pusbindiklatren Tahun 2023	96,12
Total Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pusbindiklatren Tahun 2022	93,65

Dari Tabel 3.21 dapat diketahui terjadi peningkatan capaian kepuasan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Peningkatan nilai capaian tingkat kepuasan atas layanan pembinaan JFP dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 2,47 yaitu dari 93,65 menjadi 96,12.

C. Capaian Kinerja Lainnya

1. Tindak Lanjut Rekomendasi Kegiatan Tahun 2022

Hasil rekomendasi kegiatan Pusbindiklatren tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti oleh Pusbindiklatren pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Tindak Lanjut Rekomendasi 2022

No.	Rekomendasi 2022	Tindak Lanjut 2023	Dampak Tindak Lanjut
POKJA 0			
1	Pembaharuan secara menyeluruh mengenai informasi dan tampilan yang berkaitan dengan program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan jabatan fungsional perencana pada laman website Pusbindiklatren	Pembaharuan secara menyeluruh mengenai informasi dan tampilan yang berkaitan dengan program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan jabatan fungsional perencana pada laman website Pusbindiklatren	Pembaharuan secara menyeluruh mengenai informasi dan tampilan yang berkaitan dengan program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan jabatan fungsional perencana pada laman website Pusbindiklatren
2	Pengembangan visualisasi hasil tabulasi kuesioner, create sertifikat bagi pengajar, pengelompokkan sistem penilaian pada aplikasi Sintesa	Pengembangan visualisasi hasil tabulasi kuesioner, create sertifikat bagi pengajar, pengelompokkan sistem penilaian pada aplikasi Sintesa	Sintesa menjadi semakin fasilitatif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pelatihan Pusbindiklatren
3	Evaluasi Majalah SImpul Perencana dan penyesuaian jumlah terbitan dalam satu tahun	Pelaksanaan penerbitan sejumlah 3 kali secara tepat waktu dan sesuai dengan target	Pembaca Majalah Simpul Perencana meningkat Diterimanya *feedback* dari pembaca atas penerbitan Majalah

No.	Rekomendasi 2022	Tindak Lanjut 2023	Dampak Tindak Lanjut
		Pendistribusian majalah secara digital dan pencetakan, dibantu oleh Biro Umum dan Biro HKTUP Adanya evaluasi pembaca	Simpul Perencana yang telah diterbitkan
4	Penyelenggaraan program yang berkaitan dengan diseminasi hasil *knowledge management*, seperti: workshop penulisan karya tulis ilmiah, sharing session dan temu alumni, dan *ministerial lecture*	• Terselenggaranya program-program knowledge management, seperti: Studio Mini • *Webinar* PusbinTalk sebanyak 6 kali, *Workshop Gaming Simulation*, *Workshop Research*, *Pusbin Book Writing Camp*, Publikasi Digital Majalah Simpul Perencana, Sosialisasi dan *Booth Program Offline*, Pembuatan Video PusbinLearn, Liputan Pusbin Sepekan, Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Bappenas Working Papers, Indeksasi JISDeP pada DOAJ, dan *Ministerial Lecture*.	Kanal-kanal informasi Pusbindiklatren semakin variatif. Kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung peningkatan kompetensi perencana semakin variatif dan kolaboratif. Pendiseminasian program dan produk Pusbindiklatren menjadi lebih masif dan menjangkau lebih banyak pihak.
5	Pembaharuan format pelaksanaan kegiatan Obrolan Djumat Pagi, Buka Warung IDW, dan Klinik Perencana	Evaluasi format pelaksanaan kegiatan Obrolan Djumat Pagi, Buka Warung IDW, dan Klinik Perencana	Pelaksanaan Kegiatan Obrolan Djumat Pagi, Buka Warung IDW, dan Klinik Perencana lebih tertata
6	Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Menyusun dan melengkapi dokumen penilaian WBBM	Kesiapan Pusbindiklatren dalam penilaian WBBM
7	Pembaharuan Standar Pelayanan, terutama SOP Pelayanan Tamu Luring	Review SOP Pelayanan Tamu	Pelayanan Tamu lebih optimal
POKJA 1			
1	Pelaksanaan *On The Job Training* yang meliputi • Penyusunan naskah kerja sama dengan para institusi mitra; • Evaluasi pelaksanaan pilot project OJT.	• Pelaksanaan OJT di tahun 2023 mencakup OJT dalam negeri dan luar negeri • Untuk mitra di luar negeri, telah disusun Cooperation Agreement dengan 3 mitra yaitu Hiroshima University, Ritsumeikan University, dan JICE. • Untuk mitra di dalam negeri telah disusun konsep naskah kerja sama baik NK maupun	• Pelaksanaan OJT dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan target sasaran program. • Dengan dilaksanakan evaluasi, pelaksanaan OJT dapat diukur keberhasilan pengelolaanya serta diperoleh contoh baik pelaksanaan OJT yang dapat dijadikan patok banding

No.	Rekomendasi 2022	Tindak Lanjut 2023	Dampak Tindak Lanjut
		PKSO dengan 8 institusi mitra, yaitu BKN, BRIN, Bappeda Kota Batu, Bappeda Kota Semarang, FEB UB, INDEF, Kemendes PDTT, PPKP Unhas. ● Telah dilakukan evaluasi pilot project OJT Luar Negeri, sedangkan OJT Dalam Negeri belum dapat dilakukan evaluasi karena beberapa peserta masih menjalankan OJT. ● Untuk evaluasi mitra pelaksana OJT, telah dilakukan pemantauan ke masing-masing institusi mitra.	untuk pelaksanaan selanjutnya.
2	Mengevaluasi pelaksanaan *pilot project* pelatihan bauran (*hybrid*) untuk perbaikan di masa mendatang.	● Telah dilaksanakan pilot project pelatihan bauran, dari hasil pelaksanaan tersebut telah diperoleh data untuk evaluasi pelaksanaan. ● Khusus untuk pelatihan di daerah target afirmasi direkomendasikan agar pelatihan diselenggarakan secara luring.	Dengan dilaksanakan evaluasi, pelaksanaan pelatihan bauran dapat diukur keberhasilan pengelolaanya serta didapatkan pola yang baik dan sesuai untuk penyelenggaran pelatihan.
3	Melanjutkan fasilitasi HCDP kepada K/L/D dan melakukan harmonisasi serta koordinasi fasilitasi HCDP dengan LAN.	● Telah dilaksanakan fasilitasi HCDP kepada K/L/D sejumlah 35 fasilitasi yang meliputi reviu dokumen, menjadi narasumber dalam rapat K/L/D, konsultasi/kunjungan, dan pelatihan/bimbingan Teknik. ● Telah dilaksanakan audiensi dengan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi LAN untuk mendiskusikan sinergi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi yang dilakukan Pusbindiklatren. Akan disusun Surat Keputusan TIM Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi dengan melibatkan LAN.	Terwujudnya sinergi dengan pembuat kebijakan pengembangan kompetensi ASN.

No.	Rekomendasi 2022	Tindak Lanjut 2023	Dampak Tindak Lanjut
4	Mengidentifikasi potensi dan mengembangkan skema-skema pembiayaan cofunding yang bisa dikerjasamakan dengan mitra K/L/D maupun mitra pembangunan lainnya.	• Telah dilakukan pengembangan kerja sama *cost sharing* dengan mitra K/L/D untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. • Pada tahun 2023 telah ditandatangani NK untuk kerja sama *cost sharing* program pendidikan dengan Pemkot. Malang, Pemkot. Semarang, Pemkot. Batu, dan Pemkab. Penajam Paser Utara. • Sedangkan untuk *cost sharing* pelatihan telah dilakukan kerja sama dengan Pemprov. Sumsel, Pemkot. Palembang, • Pembahasan kerja sama program pendidikan *cost sharing* juga telah dilakukan dengan beberapa instansi lainnya yaitu Pemprov. Aceh; Pemkot.Medan; Pemprov Sulut; Pemprov. NTB, Pemprov. Jatim • Pembahasan kerja sama program pelatihan *cost sharing* juga telah dilakukan dengan beberapa instansi lainnya yaitu Kemendikbudristek, Prov. Kaltim. Pemkab. Muara Enim, Pemkot Denpasar. • Diskusi kerja sama pelaksana pendidikan dan pelatihan dengan Universitas Airlangga, Monash University, NTU, LKY NUS, Universitas Tanjung Pura, Universitas Negeri Padang, UQ • Kerja sama dengan mitra pembangunan telah dilakukan dengan JICA terkait pelaksanaan S-2 *Linkage*, dan LPDP untuk pelaksanaan pendidikan luar negeri dan *linkage*. Kerja sama dengan USAID untuk pelaksanaan program OJT Papua	Didapatkan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang bersumber dari dana selain anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Kerja sama ini juga membuka peluang lebih luas bagi ASN untuk mengakses beasiswa pendidikan dan pelatihan. Diperlukan pengelolaan yang cermat untuk penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dengan skema cost sharing agar dapat dicapai tujuan.

No.	Rekomendasi 2022	Tindak Lanjut 2023	Dampak Tindak Lanjut
POKJA 2			
1	Implementasi pilot project OJT khususnya bagi ASN daerah ke instansi di pusat atau daerah lain yang menjadi percontohan.	OJT DN • Penentuan lokus/tempat magang bagi peserta dalam negeri sejak awal ditawarkan • Koordinasi dengan lokus/tempat magang	Koordinasi penempatan peserta OJT Dalam Negeri yang lebih sistematis.
2	Implementasi *pilot project* pelatihan bauran sebagai tindak lanjut dari masukan peserta pelatihan tahun sebelumnya dan juga sebagai implikasi dicabutnya PPKM oleh pemerintah.	Pelaksanaan pelatihan teknis dan spesifik secara bauran (komponen daring dan luring)	Meningkatnya pemahaman dan pengalaman peserta pelatihan bauran jika dibandingkan dengan pelaksanaan pelatihan secara daring.
3	Implementasi seleksi wawancara untuk seluruh calon penerima beasiswa pendidikan untuk memastikan diperolehnya calon karyasiswa yang memenuhi persyaratan.	Implementasi seleksi wawancara untuk program linkage luar negeri.	Diperolehnya karyasiswa yang sesuai dengan persyaratan dan standar kemampuan bahasa Inggris. Pusbindiklatren dapat memetakan kepribadian karyasiswa, dan mengukur potensi pencapaian dan keberhasilan studi.
POKJA 3			
1	Melanjutkan rencana kegiatan Pembekalan Uji Kompetensi JFP bagi para calon peserta uji kompetensi	Melaksanakan pembekalan Uji Kompetensi sebanyak 4 kali sesuai dengan jadwal pelaksanaan uji kompetensi	Meningkatnya jumlah peserta yang lulus uji kompetensi
2	Melanjutkan penyusunan peraturan turunan sebagai amanah dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2020	Telah disusunnya draft Petunjuk Teknis Standar Kompetensi, Petunjuk Teknis Pengembangan Kompetensi, Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam JFP	Draf telah tersusun, namun, dikarenakan keluarnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, sehingga penyusunan draf ini perlu dilakukan penyesuaian dengan PemenPANRB tersebut
3	Melaksanakan Seminar Nasional JFP dalam rangka mengetahui dan menampung aspirasi dari para Instansi Pengguna JFP dan bagi para Perencana terkait dengan implementasi peraturan-peraturan baru dan juga	Seminar Nasional JFP telah dilaksanakan pada bulan September 2023 dan diikuti kurang lebih 1.000 peserta.	Seminar Nasional JFP dengan mengangkat tema yang sesuai dengan kebijakan baru, dimana banyak perencana yang belum paham terkait isu bahwa penilaian angka kredit tidak lagi mengajukan dengan butir kegiatan

No.	Rekomendasi 2022	Tindak Lanjut 2023	Dampak Tindak Lanjut
	pasca program penyetaraan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional		
	Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dengan mengambil sampel instansi dengan jumlah pejabat fungsional perencana hasil penyetaraan terbanyak dan/atau instansi dengan jumlah lulusan uji kompetensi terbanyak	Pemantauan dan evaluasi JFP telah dilaksanakan di 10 Provinsi dan 3 Kota untuk menampung permasalahan pembinaan JFP di daerah, serta mengumpulkan data jumlah perencana di daerah tersebut	Terkumpulnya data jumlah Perencana di Provinsi dan Kota, serta pemetaan permasalahan pembinaan JFP di masing-masing daerah.
4	Penyelenggaraan uji kompetensi yang semula berbasis daring/*online* menjadi luring/*offline*	Pelaksanaan uji kompetensi tahun 2023 dilaksanakan seluruhnya secara daring/*online*.	Dilaksanakannya pelaksanaan uji kompetensi tahun 2023 secara daring memiliki kelemahan dalam hal pengawasan.

Pada tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok kerja (Pokja) di Pusbindiklatren. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan pada tahun 2023. Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti pada tahun 2023 diantaranya adalah pembaharuan sistem informasi, penyelenggaraan *Webinar* PusbinTalk, dan *workshop* dengan melibatkan narasumber internasional, penyelenggaraan program pendidikan *cost sharing*, penyelenggaraan OJT, penyelenggaraan pelatihan bauran, penyelenggaraan seminar nasional JFP, serta penyelenggaraan pembekalan uji kompetensi.

2. Inovasi Pusbindiklatren Tahun 2023

Tahun 2023, Pusbindiklatren telah melakukan beberapa inovasi yang terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.23 Inovasi Pusbindiklatren Tahun 2023

No.	Pokja	Inovasi Tahun 2023
1	**POKJA 0:** Organisasi, Tata Laksana, dan Administrasi Keuangan	• Studio Mini • *Webinar* PusbinTalk • *Workshop Gaming Simulation* • *Workshop Research* • *Pusbin Book Writing Camp* • Publikasi Digital Majalah Simpul Perencana • Sosialisasi dan *Booth* Program *Offline* • Pembuatan Video PusbinLearn • Liputan Pusbin Sepekan • Pengelolaan Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Bappenas Working Papers • Indeksasi JISDeP pada DOAJ

No.	Pokja	Inovasi Tahun 2023
2	**POKJA 1:** Perencanaan dan Pengembangan	• Desain Program Pelatihan Bauran • Desain Program S-2 Regular Plus • Desain Program S-2 DXHR • Desain Program Pendidikan *Cost Sharing* • Desain Program Pelatihan *Cost Sharing*
3	**POKJA 2:** Pendidikan dan Pelatihan	• OJT (Luar Negeri, Dalam Negeri dan Kolaborasi) • Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan *Cost Sharing* • Kebijakan Disabilitas Fisik • Pelaksanaan Seleksi Wawancara • Pelaksanaan Pelatihan Hybrid • Pelaksanaan Program Pendidikan S-2 Reguler Plus • Pelaksanaan *Ministerial Lecture* • Kerja sama pelatihan melalui pendanaan hibah NTU/NUS
4	**POKJA 3:** Pengembangan dan Pembinaan JFP	• Penyusunan Regulasi JFP • Pedoman Penyusunan Formasi JFP • Penyusunan Juknis Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam JFP • Penyusunan Juknis Standar Kompetensi JFP • Penyusunan Juknis Pengembangan Kompetensi JFP
5	**Kelompok Strategis**	• Inisiasi Studi Pengembangan BLU • Pengembangan Model *Corporate University*

Inovasi Pusbindiklatren pada tahun 2023 dikelompokkan berdasarkan Pokja yang melaksanakan kegiatan di Pusbindiklatren. Beberapa contoh inovasi yang dihasilkan dan dilakukan Pusbindiklatren diantaranya adalah Studio Mini Pusbindiklatren, *Webinar* PusbinTalk, Pusbin Book Writing Camp, *Workshop Gaming Simulation*, indeksisasi JISDeP pada DOAJ, desain program pelatihan bauran, S-2 Regular Plus, DXHR, Pendidikan *Cost Sharing*, Pelatihan *Cost Sharing*, Pelaksanaan OJT, Penyusunan Regulasi JFP, serta Inisiasi Pengembangan BLU dan *Corporate University*.

3. Perkembangan Fasilitasi Penyusunan HCDP 2023

Pusbindiklatren mengembangkan kebijakan pengembangan kompetensi bagi PNS Perencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penyusunan rencana penempatan kembali (*re-entry*) peserta diklat di instansinya masing-masing setelah mereka menyelesaikan diklatnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menguatkan pendekatan *link and match* antara program pendidikan dan pelatihan ASN Perencana yang dikembangkan di Pusbindiklatren dengan kebutuhan ASN Perencana yang kompeten di instansi pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu Pusbindiklatren menginisiasi kegiatan fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) sejak tahun 2018.

Fasilitasi yang dilakukan oleh Pusbindiklatren bermula dari pelaksanaan rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh para pejabat pembina kepegawaian, pejabat penanggung jawab peningkatan kapasitas SDM dan pejabat perencanaan program di instansi pusat maupun daerah hingga layanan fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen HCDP. Metode layanan fasilitasi yang diberikan oleh Pusbindiklatren adalah

1) konsultasi tatap muka langsung, untuk instansi yang datang langsung ke kantor Pusbindiklatren Bappenas;
2) konsultasi melalui media elektroknik, seperti pesan pendek (*short messages services* atau sms), aplikasi media sosial seperti WhatsApp, atau surat elektronik (*e-mail*);
3) sosialisasi penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Perencana Pembangunan ke instansi atas undangan instansi;
4) bimbingan teknis atau workshop penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Perencana Pembangunan sesuai kebutuhan K/L/D;
5) *knowledge sharing* secara daring antar instansi pemerintah; dan atau
6) pendampingan penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM ASN Perencana Pembangunan kepada instansi pusat maupun darerah yang membutuhkan.

Pada tahun 2023, Pusbindiklatren telah melaksanakan 35 kegiatan fasilitasi HCDP pada 21 instansi. Daftar dan perkembangan penyusunan HCDP untuk masing-masing instansi ditunjukkan dalam Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Daftar Instansi yang Mengikuti Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Perencana

No.	Nama K/L/D	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Fasilitasi
1	Kabupaten Bengkalis	2 Januari 2023	Reviu Dokumen
2	Kementerian Kominfo	26 Januari 2023	Narasumber
3	Pemprov. Jawa Tengah (BPSDM)	24 Februari 2023	Kunjungan/Diskusi
4	Kementerian Perdagangan	27 Februari 2023	Kunjungan/Diskusi
5	Kabupaten Sukoharjo (BKPP)	9 Maret 2023	Kunjungan/Diskusi
6	Kementerian Parekraf/Baparekraf	14 Maret 2023	Narasumber
7	Kementerian Luar Negeri	30 Maret 2023	Narasumber
8	Pemkot Padang (BKPSDM)	15 Mei 2023	Kunjungan/Diskusi
9	Pemprov. Jawa Tengah (BPSDM)	16 Mei 2023	Kunjungan/Diskusi

No.	Nama K/L/D	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Fasilitasi
10	Kabupaten Bengkalis	31 Mei 2023	Kunjungan/Diskusi
11	Pemprov. Jawa Tengah (BPSDM)	13 Juni 2023	Narasumber
12	Pemprov. Jawa Tengah (BPSDM)	15 Juni 2023	Kunjungan/Diskusi
13	Kementerian Hukum dan HAM	26 Juni 2023	Narasumber
14	Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6 Juli 2023	Kunjungan/Diskusi
15	Pemerintah Kota Samarinda	11 Juli 2023	Kunjungan/Diskusi
16	Pemerintah Kota Padang	19—22 Juli 2023	Pelatihan
17	Kementerian Hukum dan HAM	1—2 Agustus 2023	Narasumber
18	Pemerintah Kabupaten Sleman (BKPP)	2 Agustus 2023	Kunjungan/Diskusi
19	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (BKPSDM)	23 Agustus 2023	Kunjungan/Diskusi
20	Pemprov. Jawa Tengah (BPSDM)	30 Agustus, 1—5 September 2023	Pelatihan
21	Kementerian Hukum dan HAM	10—13 September 2023	Narasumber
22	Kabupaten Sukoharjo (BKPP)	25 September 23	Reviu Dokumen
23	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	26 September 2023	Narasumber
24	Kementerian Perdagangan	27 September 23	Narasumber
25	Kabupaten Tangerang (BKPSDM)	4 Oktober 2023	Kunjungan/Diskusi
26	Kabupaten Boyolali (BKP2D)	27 Oktober 2023	Kunjungan/Diskusi
27	Kota Solok (BKPSDM)	2 November 2023	Kunjungan/Diskusi
28	Kabupaten Tangerang (BKPSDM)	6—9 November 2023	Pelatihan
29	Kota Solok (BKPSDM)	13—15 November 2023	Pelatihan
30	Kabupaten Boyolali (BKP2D)	21—23 November 2023 (Batch 1)	Pelatihan
31	Kabupaten Boyolali (BKP2D)	27—29 November 2023 (Batch 2)	Pelatihan
32	Kota Cilegon (BKPSDM)	29—30 November 2023	Pelatihan
33	Pemprov. Jawa Tengah (BPSDM)	30 November, 1, 4, 5 Desember 2023	Pelatihan
34	Kota Mataram	13 Desember 2023	Kunjungan/Diskusi
35	Pemprov. Jawa Tengah (BPSDM)	18 Desember 2023	Kunjungan/Diskusi

Berdasarkan kategori instansinya, terdapat 13 pemerintah daerah dan 8 kementerian/lembaga yang telah difasilitasi oleh Pusbindiklatren. Kegiatan fasilitasi tahun mendatang akan dilanjutkan dengan prioritas target memberikan pendampingan bagi instansi yang sedang menyusun serta yang direncanakan akan menyusun HCDP pada tahun 2024.

D. Capaian Kinerja Anggaran Pusbindiklatren Tahun 2023

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran Pusbindiklatren pada tahun 2023 sebesar Rp81.776.813.323 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau 99,38 persen dari total anggaran sebesar Rp82.286.430.000 (delapan puluh dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Rincian realisasi anggaran (data per 31 Desember 2023) sebagaimana Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran 2023

Pembiayaan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Loan	PHRD IV	30.721.925.000	30.327.231.084	98,72%
	SMART	50.000.000	0	0,00%
Sub Total		**30.771.925.000**	**30.327.231.084**	**98,55%**
Rupiah Murni (RM)	Rupiah Murni	44.621.887.000	44.571.023.242	99,89%
	Lintas Bidang Sewa Rumah	1.555.508.000	1.548.000.000	99,52%
	Lintas Bidang Kode CA	4.295.026.000	4.288.474.997	99,85%
	Lintas Bidang Kode CL	105.000.000	105.000.000	100,00%
	Perjalnan Dinas Luar Negeri	937.084.000	937.084.000	100,00%
Sub Total		**51.514.505.000**	**51.449.582.239**	**99,87%**
TOTAL		**82.286.430.000**	**81.776.813.323**	**99,38%**

Berdasarkan Tabel 3.25 dapat diketahui realisasi anggaran sebagai berikut.

a. Realisasi anggaran PLN sebesar Rp30.327.231.084,00 (98,55%) dari total anggaran Rp30.771.925.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari pinjaman *Professional Human Resources Development* IV (PHRD IV) dan *Strengthening Apparatus Management and Development in Indonesia* (SMART).

b. Realisasi anggaran RM sebesar Rp51.449.582.239,00 (99,87%) dari anggaran sebesar Rp51.514.505.000,00. Anggaran tersebut berdasarkan empat *output* yaitu (1) Program Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan; (2) Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; (3) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana; dan (4) Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi, dan Informasi serta Evaluasi Program.

c. Realisasi anggaran lintas bidang sewa rumah sebesar Rp1.548.000.000,00 (99,52%) dari total anggaran Rp1.555.508.000,00; anggaran ini digunakan untuk penyewaan kantor arsip dan kantor PPK Pusbindiklatren.

d. Realisasi anggaran lintas bidang Kode CA adalah sebesar Rp4.288.474.997,00 dari pagu anggaran sebesar Rp4.295.026.000,00 atau sebesar 99,85%. Anggaran lintas bidang Kode CA dialokasikan untuk kegiatan menghadiri konsinyering, pembayaran EO, kegiatan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN, perjalanan dinas, dan kegiatan pelatihan Evaluasi RPJMN di Australia. Sementara realisasi anggaran lintas bidang kode CL adalah 100% dengan pagu angaran Rp105.000.000,00.

e. Pada komponen pembiayaan perjalanan dinas luar negeri, realisasi anggaran adalah 100% daripagu anggaran sebesar Rp937.084.000,00.

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Per Penanggung Jawab

Penanggung Jawab		*Loan*	RM	RMP	Total
POKJA 0	Anggaran (Rp)	5.078.585.000	10.035.637.866	0	15.114.222.866
	Realisasi (Rp)	4.690.172.232	10.022.287.122	0	14.712.459.354
	Persentase	92,35%	99,87%	0,00%	97,34%
POKJA 1	Anggaran (Rp)	-	3.246.724.000	-	3.246.724.000
	Realisasi (Rp)	-	3.225.879.220	-	3.225.879.220
	Persentase	0,00%	99,36%	0,00%	99,36%
POKJA 2	Anggaran (Rp)	25.693.340.000	29.201.402.000	-	54.894.742.000
	Realisasi (Rp)	25.637.058.852	29.197.603.872	-	54.834.662.724
	Persentase	99,78%	99,99%	0,00%	99,89%
POKJA 3	Anggaran (Rp)	-	2.127.087.000	-	2.127.087.000
	Realisasi (Rp)	-	2.125.253.028	-	2.125.253.028
	Persentase	0,00%	99,91%	0,00%	99,91%
Lintas PPK	Anggaran (Rp)	-	6.892.618.000	-	6.892.618.000
	Realisasi (Rp)	-	6.878.558.997	-	6.878.558.997
	Persentase	0,00%	99,80%	0,00%	99,80%
Total Anggaran Pusbindiklatren	**Anggaran (Rp)**	**25.693.340.000**	**51.514.505.000**	**-**	**82.286.430.000**
	Realisasi (Rp)	**25.637.058.852**	**51.449.582.239**	**-**	**81.776.813.323**
	Persentase	**99,78%**	**99,87%**	**0,00%**	**99,38%**

Tabel 3.26 berisi informasi mengenai realisasi anggaran berdasarkan penanggung jawab. Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Pokja 3 yaitu sebesar 99,91%. Sementara pencapaian realisasi terendah terdapat pada Pokja 0 yaitu sebesar 97,34%.

2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Perbandingan penyerapan anggaran pada tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 3.27 di bawah ini. Realisasi anggaran pada tahun 20223 secara keseluruhan mengalami peningkatan 12,01% (dari 87,37% menjadi 99,38%).

Tabel 3.27 Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2023 dan 2022

2023			2022		
Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase
82.286.430.000	81.776.813.323	99,38%	74.210.726.000	64.837.013.689	87,37%

3. Analisis Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam pencapaian kinerja. Penghitungan tingkat efisiensi dilakukan menggunakan rumus:

$$\boldsymbol{Tingkat\ efisiensi = \frac{\%rata - rata\ capaian\ kinerja}{\%rata - rata\ capaian\ penyerapan\ anggaran}}$$

Kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah:

Tabel 3.28 Kriteria Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi	Keterangan
≥ 1	terjadi efisiensi
< 1	tidak terjadi efisiensi

Penghitungan tingkat efisiensi Pusbindiklatren tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Tingkat\ efisiensi = \frac{100\%}{99{,}38\%} = 1{,}006}$$

Berdasarkan ketercapaian IKU Pusbindiklatren tahun 2023, semua target IKU berhasil dicapai sehingga dapat dikatakan pesertase rata-rata capaian kinerja adalah 100%. Di

samping itu, dari kinerja anggaran, Pusbindiklatren berhasil mencapai penyerapan sebesar 99,38%, sehingga apabila dihitung tingkat efisiensi dengan membandingkan capaian target IKU dan capaian penyerapan, diperoleh nilai sebesar sebesar 1,006 yang berarti bahwa telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Beberapa hal yang telah dilakukan Pusbindiklatren untuk mendukung terjadinya efisiensi penggunaan anggaran antara lain

a. metode pelaksanaan kegiatan koordinasi cenderung dijalankan dengan mekanisme pertemuan *hybrid meeting*;
b. pelaksanaan program pelatihan dengan mekanisme bauran (*hybrid*) untuk pelatihan teknis dan spesifik, serta pelatihan dengan metode daring untuk pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama;
c. pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional perencana yang masih diselenggarakan dengan metode daring untuk seluruh tahapan dan jenjang uji kompetensi;
d. pemantauan dan pengendalian terhadap karyasiswa dan penerima program Pusbindiklatren yang dilakukan dengan aktif dan periodik, baik secara daring maupun luring;
e. Pusbindiklatren lebih terbuka terhadap kerja sama pelaksanaan program dengan skema pembiayaan bersama ataupun pembiayaan mandiri dari instansi lain.

E. Evaluasi Internal

Pada tahun 2023, Kepala Pusbindiklatren menginisiasi penyelenggaraan rapat evaluasi dan rencana kinerja setiap bulan dengan setiap Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dan Penanggung Jawab Kegiatan (PJK). Pada rapat ini, masing-masing Ketua Pokja dan PJK menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu bulan dan rencana pelaksanaan kegiatan untuk bulan berikutnya. Pada forum tersebut, Kepala Pusbindiklatren juga menyampaikan arahan dan tanggapan terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing individu khususnya PNS di Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, terdapat juga rapat internal yang dilakukan di masing-masing kelompok kerja maupun forum untuk pegawai Pusbindiklatren secara keseluruhan.

Pusbindiklatren juga melibatkan unit kerja lain di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas seperti biro umum, inspektorat bidang administrasi dan umum, inspektorat bidang kinerja kelembagaan, biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana. Selain melibatkan pihak internal Kementerian PPN/Bappenas, Pusbindiklatren juga melibatkan pihak eksternal untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja. Pihak eksternal tersebut diantaranya dari mitra kerja sama Pusbindiklatren, peserta dan alumni program beasiswa pendidikan dan pelatihan Pusbindiklatren, serta instansi auditor eksternal.

BAB IV.
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pencapaian IKU Pusbindiklatren, sembilan IKU Pusbindiklatren telah berhasil terpenuhi target capaiannya. Pencapaian **IKU (1)** persentase Perencana yang lulus uji kompetensi sebesar 90,95% dengan target 75%; **IKU (2)** persentase karyasiswa yang lulus pendidikan adalah 81,93% dengan target 80%; **IKU (3)** persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan sebesar 99,92% dengan target 94%; **IKU (4)** persentase inovasi kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pengembangan pendidikan dan pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh institusi/unit kerja perencana pembangunan sebesar 100% dengan target 85—89,9%; **IKU (5)** tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebesar 96,10 dengan target nilai 85; **IKU (6)** persentase tata kelola lingkup Pusbindiklatren yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sebesar 100% dengan target capaian 100%; **IKU (7)** persentase pengelolaa realisasi anggaran lingkup Pusbindiklatren sebesar 99,38% dengan target capaian 92%; **IKU (8)** tingkat kepuasan atas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebesar 96,12 dengan target nilai 92; dan **IKU (9)** persentase pemenuhan direktif pimpinan lingkup Pusbindiklatren yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebesar 100% dengan target capaian 92%. Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan **pencapaian realisasi anggaran** sebesar Rp81.776.813.323 atau 99,38 persen dari total anggaran sebesar Rp82.286.430.000.

B. Tindak Lanjut

Secara umum, tindak lanjut berdasarkan penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pokja 0 (Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan)

a. Peningkatan keamanan siber.

b. Pengembangan *interface* aplikasi Sintesa.

c. Wawancara Majalah Simpul Perencana dilaksanakan *full* secara *offline*.

d. LMS Pusbidiklatren menjadi lebih inklusif dengan memberikan kesempatan bagi ASN mengakses kurikulum yang dimiliki Pusbindiklatren sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi masing-masing, misalnya dalam hal kompetensi dasar ASN Perencana (kolaborasi dengan ASN Unggul).

d. Mereviu dokumen pengusulan WBBM.

e. Mereviu SOP pelayanan tamu.

2. Pokja 1 (Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan)

a. Disusun pedoman pelaksanaan OJT yang merinci tugas dan peran para pihak terkait diantaranya Pusbindiklatren, mitra pelaksana/provider, dan mitra kerja sama lainnya.

b. Disusun pedoman pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan *cost sharing* yangmerinci tugas dan peran para pihak terkait, di antaranya Pusbindiklatren, mitra K/L/D program *cost sharing*, pihak universitas atau pelaksana program pendidikan dan pelatihan.

c. Bersama LAN memantau perkembangan regulasi prosedur penilaian kinerja yang diperlukan dalam penentuan arah pengembangan kompetensi.

d. Evaluasi mitra pelaksana pendidikan dan pelatihan secara *output* maupun *impact* program yang dilaksanakan.

e. Dilakukan studi untuk mengetahui kebutuhan salah satunya melihat ada atau tidaknya perbedaan minat atau permintaan pelatihan menggunakan skema daring dan bauran.

3. Pokja 2 (Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan)

a. *On the Job Training*

1) OJT LN

- Perlu adanya peningkatan koordinasi penawaran, seleksi, penempatan, dan pelaksanaan program OJT LN, hingga pascapelatihan sebagai bahan evaluasi kegiatan.
- Perlu memperhatikan kesesuaian tema peserta dengan *expertise* lokus OJT LN (konfirmasi apakah bisa memfasilitasi atau tidak, *networking*).

2) OJT DN

- Penelaahan komponen pembiayaan beasiswa OJT.

- Reviu aturan atau kebijakan bagi peserta dan lokus OJT (kebijakan pengembalian ke instansi asal, pembagian sertifikat, serta kebijakan *sharing session*).

3) OJT Kolaborasi

- Reviu aturan perihal proses seleksi dan penempatan peserta OJT (perubahan atau perpindahan lokus OJT) – tidak diperkenankan berpindah lokasi.
- Koordinasi dengan lokus OJT Kolaborasi (pemberitahuan keikutsertaan lokus).
- Implementasi kebijakan *sharing session* pada kemudian hari.

b. Program Pelatihan

- Standardisasi kelulusan antar-*provider* pelatihan (terutama Pelatihan Fungsional Perencana).
- Perlunya dilaksanakan sosialisasi perihal metode pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Pusbindiklatren pada tahun 2024 termasuk perihal skema pembiayaannya.
- Perlunya kejelasan kebijakan pelatihan mandiri apakah ke depannya perlu dilaksanakan kerja sama dahulu atau tidak.
- Perlunya disediakan pedoman bagi seluruh pihak yang berminat untuk melaksanakan pelatihan mandiri (termasuk pembiayaan, penjadwalan, substansi, serta pedoman wawancara).
- Penyamaan persepsi perihal kurikulum atau bahan ajar di masing-masing pelatihan.

c. Program Pendidikan

- Penyamaan persepsi antar-*interviewer* perihal proses penilaian dalam seleksi wawancara.
- Transparansi hasil nilai wawancara bagi peserta seleksi beasiswa.

4. Pokja 3 (Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana)

a. Pelaksanaan pembekalan uji kompetensi akan dilaksanakan sesuai jadwal Pusbindiklatren dengan menyesuaikan jumlah peserta.

b. Revisi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang JFP menyesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 dan melanjutkan penyusunan *draft* turunan dari peraturan.

c. Pelaksanaan kembali Seminar Nasional JFP.

d. Pemantauan dan evaluasi JFP akan dilaksanakan di sejumlah provinsi dan kota yang belum pernah dipantau dalam beberapa tahun terakhir.

e. Uji kompetensi JFP tahun 2024 sebagian akan dilaksanakan secara daring dan sebagian akan dilaksanakan secara luring di daerah tertentu.

5. Kelompok Strategis

a. *Monitoring* tindak lanjut *roadmap* Pusbindiklatren.

b. Pembaharuan data perencana pembangunan dan pendukung perencanaan pembangunan.

c. Pelaksanaan *Training Need Analysis* bagi Perencana Pemabngunan.

d. Penyusunan *Feasibility Study* (FS) Pusbindiklatren sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

e. Penyelenggaraan Temu Alumni.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Perjanjian Kinerja Kepala Pusbindiklatren Tahun 2023 -

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wignyo Adiyoso**

Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Pembangunan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Teni Widuriyanti**

Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Taufik Hanafi	Wignyo Adiyoso

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Pembangunan

Sasaran Program:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
3. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

NO	SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	**Sasaran Strategis/Program 1:** Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional		
	Indikator SS 1.1: Persentase Perencana yang memenuhi standar kompetensi		
1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	1. Persentase Perencana yang lulus uji kompetensi	75%
		2. Persentase karyasiswa yang lulus pendidikan	80%
		3. Persentase peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan	94%
II.	**Sasaran Strategis/Program 3:** Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner		
	Indikator SS 3.2: Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan		
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan	Persentase Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan	90-94,9%
III.	**Sasaran Strategis/Program 4:** Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		
	Indikator SS 4.1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas		
1	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	85

NO	SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Manajemen Internal	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana yang Sesuai dengan Ketentuan dan Aturan yang Berlaku	100%
		Persentase Pengelolaan Realisasi Anggaran Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana	92%
IV.	**Sasaran Strategis/Program 4:** Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		
	Indikator SS 4.2: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan		
1	Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan jabatan fungsional perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	92
2	Manajemen Internal	Persentase Pemenuhan Direktif Pimpinan Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana yang Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi	92%

Kegiatan: Anggaran:

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

- Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan — Rp44.721.887.000,00

Jakarta, Desember 2023

Atasan Pimpinan Unit Kerja — Pimpinan Unit Kerja

Teni Widuriyanti — Wignyo Adiyoso

Lampiran 2.

Jumlah Total Karyasiswa yang Lulus Pendidikan Tahun 2023

No.	Program	Tahun *Intake*				Total
		2018	2019	2020	2021	
1	S-2 Dalam Negeri	6	15	25	224	**270**
2	S-2 Dalam Negeri Afirmasi			10	18	**28**
3	S-2 Dalam Negeri Tematik *Smart City*			3	12	**15**
4	S-2 *Linkage* Jepang			6		**6**
5	SSMP			5		**5**
6	S-2 *Linkage* Premium		2	14		**16**
7	S-3 Dalam Negeri		3			**3**
	Total	**6**	**20**	**63**	**254**	**343**

Lampiran 3.

Pelatihan Fungsional Perencana Tahun 2023

No.	Pelaksana	Tanggal Pelatihan
1	P2KP Universitas Hasanuddin	24 Juli—8 September 2023
2	Magister Ekonomika Terapan Universitas Padjadjaran	24 Juli—8 September 2023
3	LPEM Universitas Indonesia	24 Juli—8 September 2023
4	Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada	7 Agustus—22 September 2023
5	RCCP Universitas Brawijaya	7 Agustus—22 September 2023
6	MPWK Institut Teknologi Bandung	7 Agustus—22 September 2023
7	PPs Universitas Sriwijaya	23 Agustus—13 Oktober 2023

Lampiran 4.

Pelatihan Teknis dan Spesifik Tahun 2023

No.	Topik Pelatihan	Pelaksana	Tanggal Pelatihan
1	PPD RPJMD	Universitas Trunojoyo Madura	31 Juli—12 Agustus 2023
2	Monitoring & Evaluasi	LP3E Universitas Padjadjaran	31 Juli—11 Agustus 2023
3	Perencanaan & Penganggaran	Fakultas Ekonomi Universitas Andalas	31 Juli—11 Agustus 2023
4	Pengembangan Ekonomi Lokal/Daerah	MPWK Universitas Diponegoro	31 Juli—11 Agustus 2023
5	Perencanaan Perumahan dan Perkotaan	MPWK Universitas Gadjah Mada	14—25 Agustus 2025
6	Perencanaan & Penganggaran	MEP Universitas Gadjah Mada	21 Agustus—1 September 2023
7	Perencanaan Penangulangan Bencana	PPs Universitas Syiah Kuala	25 September—6 Oktober 2023
8	Kelayakan Proyek	LEMTEK Universitas Indonesia	9—20 Oktober 2023
9	Perencanaan Lingkungan	MIL Universitas Diponegoro	9—20 Oktober 2023
10	Perencanaan Lingkungan	MIL Universitas Padjadjaran	9—20 Oktober 2023
11	PPD RPJMD (Afirmasi)	Universitas Cenderawasih	11—22 September 2023
12	Perencanaan Penanggulangan Bencana	Universitas Tadulako	30 Oktober—10 November 2023
13	PPD RPJMD (Afirmasi)	Universitas Papua	13—24 November 2023

Lampiran 5.

Pelatihan Mandiri

No.	Pelatihan	Pelaksana	Tanggal	Kategori
1	JFP Pertama	Pemprov DKI-LPEM UI	21 Februari—12 April	Pemda JW
2	Perencanaan Penganggaran	Pemkab Bolaang Mongondow Selatan	30 Januari—3 Februari 2023	Pemda LJW
3	JFP Pertama	RCCP UB-Kementerian Agama	13 Februari—31 Maret 2023	K/L
4	Perencanaan Penganggaran	Kementerian ESDM	20—24 Februari 2023	K/L
5	Perencanaan Penganggaran	BPSDM Jatim	1—11 Maret 2023	Pemda JW
6	Perencanaan Penganggaran	BKPP Berau	13—15 Maret 2023	Pemda LJW
7	Bimtek Renstra	Bappeda Prov Sumsel	8—10 Maret 2023	Pemda LJW
8	Pelatihan Renstra	Kementerian Pertanian	3—5,11,67—17 Mei 2023	K/L
9	Workshop Renstra	KPK	8—10 Mei 2023	K/L
10	JFP Pertama	Kementerian Kesehatan	22 Mei—7 Juli 2023	K/L
11	Bimtek Renstra	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14—16 Juni 2023	K/L
12	Bimtek Perencanaan	Pemprov DKI-MPWK ITB	3 Juli—18 Agustus	Pemda JW
13	Pelatihan Perencanaan Penganggaran	Kementerian ESDM	24—28 Juli 2023	K/L
14	Pelatihan Pengayaan JFP	Pemprov Sulteng	2—4 Agustus Daring 7—8 Luring	Pemda LJW
15	Pelatihan Renstra	Kemenko Marves	28 Agustus—1 September 2023	K/L
16	Perencanaan Penganggaran	Pemprov Riau	2—6 Oktober	Pemda LJW
17	Renstra	Kab Boyolali	25 September	Pemda JW
18	JFP Pertama	Kemen PUPR	9 Oktober	K/L
19	Perencanaan Penganggaran	BPSDM Jatim	12—14, 16—17 Oktober	Pemda JW
20	Perencanaan Penganggaran	BPSDM Jatim	19—21, 22—3 Oktober	Pemda JW

No.	Pelatihan	Pelaksana	Tanggal	Kategori
21	Pengayaan JFP	Pemkot Palu	30 Oktober—3 November	Pemda LJW
22	Renstra	Kab. Sarolangun	3—5 November	Pemda LJW
23	RPJMD	Pemprov Kalbar	7—9 November	Pemda LJW
24	Perencanaan Penganggaran	Pekmkab Kaur	20—22 November	Pemda LJW
25	Perencanaan Penganggaran	BPSDM Jatim IV	16—21 November	Pemda JW
26	Perencanaan Penganggaran	BPSDM Jatim V	23—28 November	Pemda JW
27	Perencanaan Penganggaran	Pemkot Jambi	5—7 Desember	Pemda LJW
28	Perencanaan Penganggaran	BPSDM Kemendagri Makassar	11—15 Desember 2023	K/L
29	Perencanaan Penganggaran	Pemkot Padang	4—6 Desember	Pemda LJW

Kementerian PPN/ Bappenas | Pusbindiklatren

PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Alamat : Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telepon : (021) 319-28280, 319-28285, 319-28279
Faksimile : (021) 319-28281 | Whatsapp : 0811-76-28280
Pos-el : pusbindiklatren@bappenas.go.id
Situs Web : pusbindiklatren.bappenas.go.id